



**ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
KABUPATEN BANYUWANGI
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)**

TESIS

Oleh:

**Ilzam Nuzuli, S.E.
NIM. 150820201012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
KABUPATEN BANYUWANGI
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)**

TESIS

digunakan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Ekonomi (S2) dan memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi (M.Si.)

Oleh:

**Ilzam Nuzuli, S.E.
NIM. 150820201012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Alm. Hj. Ma'shumah dan Ayahanda Alm. H. Ma'shum Syafi'i., terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, serta bimbingan dan doanya yang selalu mengiringi langkah dan kehidupanku;
2. Istriku Puput Tri Wahyuni dan anak-anakku, Bima, Arya, Ahnaf dan Aufad, terima kasih untuk doa, kasih sayang dan dan dukungan perjuangannya;
3. Seluruh pembimbing dan guruku mulai jenjang SD, Pesantren sampai perguruan tinggi, terima kasih telah memberikan ilmu dan dan pendidikan yang baik;
4. Almamater Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya cintai.

MOTTO

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu". (HR. Turmudzi)

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Alam
Nasyroh: 5)*

*Wahai orang-orang yang beriman, Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan Salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S. Al-
Baqoroh : 153)*

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilzam Nuzuli, S.E.

NIM : 150820201012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “*Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)*” adalah benar – benar karya tulis sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2020
Yang menyatakan,

Ilzam Nuzuli, S.E.
NIM 150820201012

TESIS

**ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
KABUPATEN BANYUWANGI
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)**

Oleh:

**Ilzam Nuzuli, S.E.
NIM. 150820201012**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini disetujui
Tanggal: 1 November 2020

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.
NIP. 19710610 200112 2 002

Pembimbing Anggota

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 19720713 199903 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu
Ekonomi

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.
NIP. 19710610 200112 2 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
KABUPATEN BANYUWANGI
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ilzam Nuzuli, S.E.

NIM : 150820201012

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

21 November 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi (M.Si.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Dr. Zainuri, M.Si.

NIP. 19640325 198902 1 001

Anggota I

Anggota II

Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

NIP. 19690718 199512 2 001

Dr. Moh. Adenan, M.M.

NIP. 19661031 199203 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4x6
warna

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP. 19661020 199002 2 001

“Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)”

Ilzam Nuzuli, S.E.

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Kemajuan pembangunan yang pesat di Kabupaten Banyuwangi tentu berdampak kepada perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Percepatan pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman dikhawatirkan berakibat pada berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk menganalisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi. 2) Untuk memformulasikan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Multidimensional scaling* dengan metode *Rapfish* dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi secara multidimensi meliputi: dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yaitu dimensi ekonomi, jika dibandingkan dengan dimensi lainnya (ekologi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan infrastruktur dan teknologi). Hasil dari *Analytic Hierarchy Process* menunjukkan bahwa strategi prioritas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan *masterplan* daerah Kabupaten Banyuwangi adalah aspek kelembagaan. Peran dan fungsi kelembagaan serta kesigapan dalam kinerja diharapkan dapat mengarah kepada tercapainya sistem pengelolaan manajemen tata ruang yang baik. Aspek ekologi menjadi tonggak keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada pengelolaan manajemen keruangan. Diperlukan konsistensi dalam penerapan kawasan hijau, pengelolaan lahan, serta keserasian fungsi lahan dalam menciptakan RTH dan lahan pertanian tidak berubah fungsi menjadi guna lahan lainnya.

Kata Kunci: Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah, Metode Rapfish, *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

*"Analysis of Regional Spatial Planning in Banyuwangi Regency
(Perspective of Sustainable Development) "*

Ilzam Nuzuli, S.E.

*Master of Economics Postgraduate Study Program Faculty of Economics and
Business
University of Jember*

ABSTRACT

The rapid development progress in Banyuwangi Regency certainly has an impact on changes in economic, social and environmental conditions. It is feared that the acceleration of industrial or service growth and settlement will result in a reduction in the carrying capacity of the environment due to the disposal of waste into the environmental media of water, soil and air. The purpose of this determination: 1) To find out the sustainability status of the Regional Spatial Planning in Banyuwangi Regency in terms of the ecological, economic, social, legal and regulatory dimensions, institutional, infrastructure and technology. 2) To formulate a sustainable Regional Spatial Planning policy in Banyuwangi Regency, so as to encourage the management of sustainable spatial management. This type of research uses a quantitative approach with quantitative descriptive methods. Data analysis methods used in this study are Multidimensional scaling analysis with Rappfish and Analytical Hierarchy Process (AHP) methods. The results showed that the multidimensional sustainability of the Regional Spatial Plan in Banyuwangi Regency included: ecological, economic, social, legal and regulatory dimensions, institutional, infrastructure and technology had an influence on the sustainability of the Regional Spatial Plan in Banyuwangi. The dimension that most influences the sustainability status of the Regional Spatial Plan in Banyuwangi Regency is the economy dimension, when compared to other dimensions (ecology, social, law and regulation, institutional infrastructure and technology). The results of the Analytic Hierarchy Process show that the priority strategy in setting policies related to the Banyuwangi Regency masterplan is the institutional aspect. The role and function of the institution as well as readiness in performance are expected to lead to the achievement of a good spatial management system. The ecological aspect is a milestone in the success of sustainable development that is applied to spatial management. Consistency is needed in the application of green areas, land management, and harmony of land functions in creating green open space and agricultural land does not change functions into other land uses.

Keywords: Sustainability of Regional Spatial Planning, Rappfish Method, Analytical Hierarchy Process (AHP)

RINGKASAN

Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi (Pespektif Pembangunan Berkelanjutan); Ilzam Nuzuli, S.E., 150820201012; 2020; 164 halaman; Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Kemajuan pembangunan yang pesat di Kabupaten Banyuwangi tentu berdampak kepada perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Percepatan pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman dikhawatirkan berakibat pada berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang mengabaikan fungsi ekologis sekitarnya, dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan lahan. Oleh karena itu, pentingnya implementasi rencana tata ruang dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyuwangi agar proses pembangunan dilakukan mempunyai nilai keberlanjutan sehingga dapat mencegah pembangunan yang tidak diinginkan dan mendorong terjadinya pembangunan. Tujuan penelitian ini dilakukan: 1) Untuk menganalisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang di tinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi; 2) Untuk memformulasikan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan metode analisis data *Multidimensional scaling* dengan metode *Rapfish* dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling kuota*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer berupa survei lapangan dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat, pengusaha, pekerja, legislatif (DPRD) dan aparatur pemerintah yang memiliki ciri ciri tertentu yang di butuhkan peneliti. Pengambilan data sekunder diperoleh melalui Badan

Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian..

Status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi secara multidimensi berada pada status cukup berkelanjutan dengan nilai indeks status keberlanjutan sebesar 74,03, nilai tersebut berada pada skala ordinasi 60,01 – 75,00, Artinya dengan nilai indeks tersebut semua dimensi meliputi: dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yaitu dimensi ekonomi, jika dibandingkan dengan dimensi - dimensi lainnya (ekologi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan infrastruktur dan teknologi). Dimensi ekonomi memiliki nilai indeks keberlanjutan yang paling tinggi dan memiliki peluang besar dalam peningkatan status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari *Analytical Hierarchy Process* menunjukkan bahwa strategi prioritas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan tata ruang daerah Kabupaten Banyuwangi adalah aspek kelembagaan. Peran dan fungsi kelembagaan serta kesigapan dalam kinerja diharapkan dapat mengarah kepada tercapainya sistem pengelolaan manajemen tata ruang yang baik. Aspek ekologi menjadi tonggak keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada pengelolaan manajemen keruangan. Diperlukan konsistensi dalam penerapan kawasan hijau, pengelolaan lahan, serta keserasian fungsi lahan dalam menciptakan RTH dan lahan pertanian tidak berubah fungsi menjadi guna lahan lainnya.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul “Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2), Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
2. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. yang telah memberikan bantuan perijinan dalam menyelesaikan karya ilmiah tertulis ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Keluargaku, ibunda Alm. Hj. Ma’shumah dan ayahanda Alm. H. Ma’shum Syafi’i., yang telah memberikan bekal, bimbingan dan doa terbaik dalam hidupku. Juga keluarga kecilku, istri tercinta Puput Tri Wahyuni dan anak-anak yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, Bima, Arya, Ahnaf dan Aufad tercinta, terimakasih atas dukungan doa dan semangat selama penyusunan tesis ini.

6. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan bantuan perijinan, dukungan data, sarana dan prasarana terkait dengan penyusunan karya ilmiah tertulis ini.
7. Sahabat dan teman teman perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 1 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS	vii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Perencanaan.....	12
2.1.2 Teori Perencanaan Wilayah	17
2.1.3 Teori Tata Ruang	20
2.1.4 Konsep Penataan Ruang.....	22
2.1.5 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	25
2.2 Penelitian Terdahulu	30

2.3 Kerangka Pemikiran	44
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Populasi, sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3.1 Jenis Data.....	46
3.3.2 Sumber Data	47
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4.1 Studi Kepustakaan	47
3.4.2 Observasi	48
3.4.3 Kuesioner	48
3.4.3 Wawancara.....	48
3.6 Metode Analisis Data.....	48
3.6.1 Analisis <i>RAP-Fish (Rapid Appraisal for Fisheries)</i> dengan metode <i>Multidimensional scaling (MDS)</i>	49
3.5.2 Analisis <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	53
3.7 Definisi Operasional.....	64
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	67
4.1.1 Keadaan Geografis.....	67
4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....	69
4.2.1 Kependudukan	69
4.2.2 Pendidikan	69
4.2.3 Kesehatan.....	70
4.2.4 Ekonomi.....	71
4.3 Hasil Analisis Data.....	72
4.3.1 Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi	72

4.3.2 Formulasi Kebijakan Publik Rencana Tata Ruang Wilayah yang Berkelanjutan dengan metode <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	98
4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data	104
4.4.1 Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi	104
4.4.2 Formulasi kebijakan publik Rencana Tata Ruang Wilayah yang Berkelanjutan dengan metode <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	106
4.4.4 Keterbatasan Penelitian	112
BAB 5. PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	121
KUESIONER.....	161

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
3.1 Kategori Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Nilai Indeks Hasil Analisis <i>Rap- Regional Spatial Planning Ordination</i> dengan teknik MDS	50
3.2 Atribut Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi	50
3.3 Nilai Skala Banding Berpasangan	56
3.4 Matriks Pendapat Individu.....	57
3.5 Matriks Pendapat Gabungan.....	58
3.6 Indeks Acak	60
4.1 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi ekologi	74
4.2 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi ekonomi	78
4.3 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi sosial	82
4.4 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi hukum dan regulasi.....	85
4.5 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi kelembagaan	89
4.6 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada dimensi infrastruktur dan teknologi	93
4.7 Hasil Analisis Status Rencana Tata Ruang Wilayah pada masing masing dimensi	95
4.8 Indeks Konsistensi Random (RI).....	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi	9
2.1 Skema Klasifikasi Konsep Penataan Ruang	24
2.2 Masalah Pembangunan Berkelanjutan	28
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	44
2.3 Struktur Hirarki	55
3.2 Struktur hirarki formulasi kebijakan untuk mendorong Terkelolanya Manajemen Keruangan dalam Pembangunan Berkelanjutan	62
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	68
4.2 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekologi	73
4.3 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekologi.	74
4.4 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekologi	76
4.5 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekonomi	77
4.6 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekonomi.	78
4.7 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi ekonomi.....	79
4.8 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi sosial	80
4.9 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi sosial.	81
4.10 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi sosial.....	83
4.11 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi hukum dan regulasi.....	84
4.12 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi hukum dan regulasi.	85
4.13 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi hukum dan regulasi	87
4.14 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi kelembagaan	88
4.15 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah	

pada dimensi kelembagaan.	89
4.16 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi kelembagaan.....	90
4.17 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi infrastruktur dan teknologi	91
4.18 Analisis <i>leverage Attributes</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi infrastruktur dan teknologi.....	92
4.19 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang Wilayah pada dimensi infrastruktur dan teknologi	94
4.20 Nilai Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan diagram layang.....	97
4.21 Hasil Struktur Hirarki Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.....	98
4.22 Aspek Prioritas Kebijakan	101
4.23 Peta Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi	110

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Atribut Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Dimensi Ekologi, Ekonomi, Sosial, Hukum dan Regulasi, Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi	121
B. Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Ekologi	123
B.1 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Ekologi	123
B.2 Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada dimensi ekologi.	124
B.3 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Ekologi	124
B.4 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Ekologi.....	125
C. Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Ekonomi	126
C.1 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Ekonomi	126
C.2 Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Ekonomi.....	127
C.3 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Ekonomi	127
C.4 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Ekonomi.....	128
D. Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Sosial	129
D.1 Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Sosial	129
D.2 Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Sosial.....	130
D.3 Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Sosial.....	130
D.4 Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Sosial.....	131
E. Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Hukum dan Regulasi	132

E.1	Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Hukum dan Regulasi	132
E.2	Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Hukum dan Regulasi.....	133
E.3	Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Hukum dan Regulasi	133
E.4	Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Hukum dan Regulasi.....	134
F.	Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Kelembagaan	135
F.1	Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Kelembagaan	135
F.2	Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Kelembagaan.....	136
F.3	Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Kelembagaan.....	136
F.4	Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Kelembagaan.....	137
G.	Output Hasil analisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi.....	138
G.1	Indeks Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	138
G.2	Analisis <i>leverage attributes</i> Rencana Tata Ruang pada Wilayah pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	139
G.3	Nilai <i>Root Mean Square</i> (RMS) tiap atribut yang ada pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	139
G.4	Analisis <i>monte carlo</i> Rencana Tata Ruang pada dimensi Wilayah pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi	140
H.	Hasil Analisis Status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah pada masing masing dimensi	141
I.	Diagram Layang Layang per Dimensi	141
J.	Output Hasil <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	142
J.1	Aspek Prioritas Kebijakan.....	142
J.2	Perhitungan Indeks Konsistensin (CI).	142
J.3	Perhitungan Rasio Konsistensi.....	142
J.4	Indeks Konsistensi Random.....	142
J.5	Hasil Struktur Hirarki Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.....	143
K.1	Peta Pola Struktur Ruang Kabupaten Banyuwangi.	144

K.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi.	145
K.3 Peta Perubahan Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi	146
K.4 Peta Topografi Kabupaten Banyuwangi.	147
K.5 Peta Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi	148
K.6 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	149



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke dan dikelilingi oleh luasnya lautan. Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau. Kota merupakan pusat pemerintahan ekonomi, industri, dan pendidikan membuat sehingga membuat orang tertarik untuk tinggal dan melakukan berbagai aktifitas di kota. Permasalahan di desa yang sangat kompleks menyebabkan terjadinya urbanisasi. Akibatnya penduduk kota semakin bertambah dengan berbagai macam masalah sosial seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan lingkungan membuat perhatian yang sangat serius dari para *stakeholder* terkait, maka dari itu untuk mengatasi berbagai macam masalah sosial perlu merencanakan pembangunan kota yang berkelanjutan dalam melakukan pembangunan wilayah.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan sebagaimana pada umumnya, menjadi *sel projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam *ideology of developmentalism*.

Pembangunan wilayah perkotaan yang terjadi saat ini tidak hanya dari sisi aktivitas, namun juga keruangannya dan keduanya membentuk hubungan saling mempengaruhi. Berkembangnya aktivitas pada suatu kota akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung perkembangan aktivitas. Sebaliknya, ruang di suatu kota tidak dapat berkembang tanpa adanya aktivitas di dalamnya. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang terjadi pada setiap kota atau wilayah yang berupa industri dan kegiatan jasa atau fasilitas yang tidak memerlukan lahan yang luas. Kegiatan ini menyebabkan kota berpenduduk

padat, jarak bangunan rapat. Terkait dengan hal ini, maka dalam pembangunan suatu kota atau wilayah, ruang dan aktivitasnya perlu direncanakan dengan baik (Puspita, 2017).

Paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) saat ini merupakan suatu pandangan pembangunan yang hanya memfokuskan pada sektor ekonomi. Paradigma pembangunan ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita negara-negara berkembang. Namun keberhasilan paradigma ini menyebabkan dampak negatif, hal ini dikarenakan momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan penurunan kualitas dari fungsi ekologis berupa penyusutan sumberdaya alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi (Suryono, 2010: 16-23).

Kesadaran akan krisis lingkungan hidup kemudian melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan. Perhatian kepada kelestarian hutan-hutan tropis di negara miskin mulai menjadi agenda penting dunia. Di sinilah kemudian lahir konsep "*sustainable development*" (Suryono, 2010: 16).

Konsep "*sustainable development*" mencoba menyeimbangkan sektor-sektor pembangunan. Menurut Budimanta (2005), pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan konsep upaya pemenuhan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya tanpa mengurangi potensi generasi selanjutnya untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut (Grunkemeyer & Moss, 2012). Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) memberikan pengetahuan baru tentang pentingnya pelestarian alam untuk masa depan. Pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari *United Nations* (dalam *Agenda for Development*) adalah pembangunan dengan wawasan *multidimensional* dalam mencapai kualitas hidup

yang lebih tinggi. Pembangunan berkelanjutan ini mencakup tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain (Kuhlmann, 2010).

Pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam untuk meningkatkan kesejahteraan generasi pada masa mendatang. Pada aspek sosial, pembangunan harus berkonteks pada kehidupan manusia dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Pembangunan juga dapat dikaitkan dengan aspek budaya dimana manusia dapat beradaptasi dengan kehidupan sekarang hingga masa mendatang. Selanjutnya dalam aspek lingkungan, faktor yang digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumberdaya yang cukup, serta lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai (Fauzi, 2004).

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Salah satu pembangunan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang.

Menurut Budiharjo & Sutarjo (2005) menjelaskan bahwa untuk menciptakan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: *Environment (Ecologi)*, *Economy (Employment)*, *Equity Engagement*, dan *Energy*. Selain itu kota yang berkelanjutan pasti akan memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik.

Pembangunan yang dilakukan pada wilayah perkotaan seharusnya diwujudkan dengan menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Jumlah sumber daya alam yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan pola hidup yang semakin meningkat. Pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi yang lain merupakan masalah utama dalam pembangunan berwawasan lingkungan (Yakin, 2014).

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu permasalahan pada perkembangan Kota saat ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Demikian juga dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (Darmawati *et al* 2015).

Dalam perkembangannya, isu pembangunan yang direspon oleh rencana tata ruang tidak lagi merupakan isu yang bersifat domestik. Kecenderungan yang terjadi adalah rencana tata ruang merespon isu-isu pembangunan yang bersifat global dan mendunia, serta mengarah pada penciptaan pembangunan yang berkelanjutan (Koresawa & Konvitz, 2001; Newman & Jennings, 2012). Hal ini dikarenakan semua negara di dunia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang mengancam pada keberlanjutan pembangunan. Ketergantungan pembangunan yang tinggi pada sumber daya alam yang ada tidak seimbang dengan kecepatan pemulihan lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan

lingkungan yang mengganggu kestabilan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Permasalahan lingkungan yang terjadi merupakan akibat dari pola pikir tradisional dalam perencanaan tata ruang yang hanya fokus pada pembangunan di dalam lingkup wilayah perencanaan, serta tidak memikirkan dampak perencanaan yang disusun terhadap wilayah sekitarnya (Faludi, 2000).

Perencanaan wilayah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dan memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi & Bratakusumah, 2003).

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta meminimalisasi dampak bencana yang akan muncul seperti banjir, tanah longsor, dan penurunan kualitas lingkungan penduduk terutama di perkotaan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada kabupaten dan kota. Kewenangannya tersebut adalah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Dampak positif dari kewenangan ini adalah kabupaten dan kota berlomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang berakibat pada adanya ketimpangan antara desa dan kota serta terjadi peningkatan semakin intensif eksploitasi sumberdaya alam.

Perencanaan tata ruang wilayah mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan wilayah harus terintegrasi dengan perencanaan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada wilayah tersebut. Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sebisa mungkin untuk menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan (Imran, 2013).

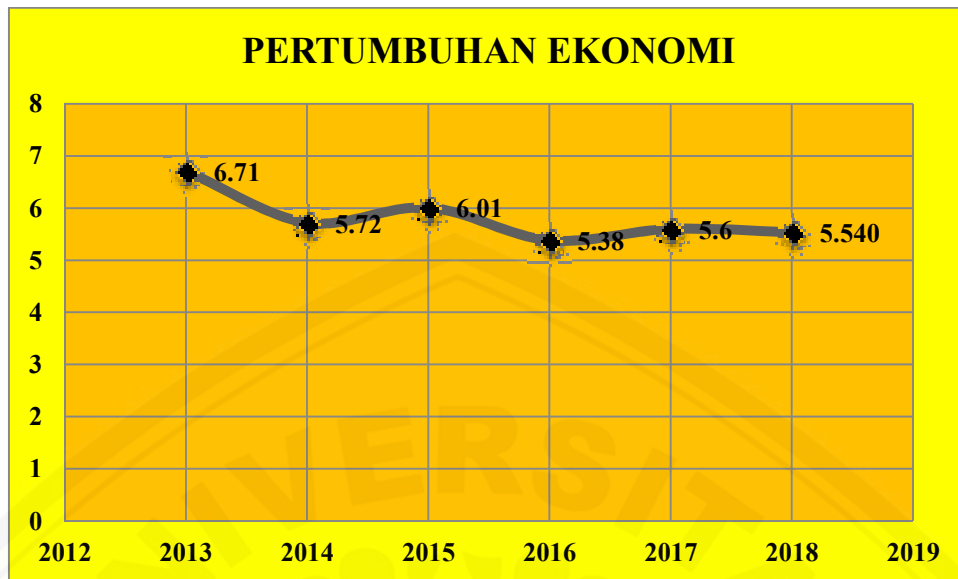
Berbagai penelitian terkait interaksi ruang dan lingkungan, telah diidentifikasi bahwa perencanaan tata ruang memainkan peran yang penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Roggema (2009) menjelaskan bahwa berkurangnya vegetasi di suatu wilayah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur dan memperbesar terjadi risiko akibat perubahan iklim. Dalam pendapat yang berbeda, Biesbroek *et al.* (2009) menjelaskan bahwa mitigasi dan adaptasi dalam mengantisipasi perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan dimensi spasial dan membutuhkan ruang untuk implementasinya. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Fleischhauer (2008) yang menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang dapat memainkan peran yang penting dalam mitigasi bencana melalui perubahan struktur perkotaan dan penguatan *resiliensi* suatu wilayah atau kota. Merujuk pada kondisi tersebut, maka perencanaan tata ruang dituntut untuk tidak sekedar mengakomodasi kebutuhan ruang dari suatu pembangunan sosial dan ekonomi. Perencanaan tata ruang dituntut untuk mulai mempertimbangkan dampak pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah terhadap kondisi lingkungan sekitar bahkan global. Perencanaan tata ruang dituntut untuk lebih ramah lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

Jadi yang menjadi kunci bagi perlunya kebijakan publik tentunya adalah konsen terhadap kebaikan seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan pembangunan yang menyoroti kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang ini, didapati pada pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan, perencanaan diperlukan dalam rangka mewujudkan

kepentingan seluruh masyarakat melalui pemeliharaan lingkungan alam (fisik), ekonomi dan kehidupan sosial (Masik, 2005).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang wilayahnya berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi geografis yang strategis dan mengalami kemajuan pembangunan yang sangat pesat. Wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km². Banyuwangi termasuk merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasankawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk (Kabupaten Banyuwangi dalam Angka, 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung menurun. Dengan menurunnya perekonomian di Kabupaten Banyuwangi daya tarik bagi investor untuk menanamkan sahamnya, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, demikian juga pada sektor industri pengolahan, bank dan lembaga keuangan, jasa – jasa, pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, bangunan dan listrik, gas dan air minum semakin mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana sebagai berikut.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2019

Kemajuan pembangunan yang pesat di Kabupaten Banyuwangi tentu berdampak kepada perubahan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Potensi geografis yang strategis dan mengalami kemajuan pembangunan yang sangat pesat Kabupaten Banyuwangi banyak diminati banyak investor yang ingin menanamkan bisnis properti di wilayah Kabupaten Banyuwangi karena melihat adanya peluang keuntungan besar yang akan diperoleh. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sulit untuk mengendalikan keinginan pihak swasta dalam penanaman modal berupa properti dan fasilitas umum.

Perkembangan kondisi wilayah di Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana kebijakan pembangunan yang terkait dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan sehingga membuat kebijakan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi diperkirakan tidak sesuai lagi. Penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kondisi sumberdaya alam (lahan). Lahan merupakan sumberdaya alam yang mendukung kehidupan, yang merupakan permukaan terluar dari bumi. Sifat biofisik lahan yang menggambarkan tujuan penggunaan lahan disebut land use atau guna lahan, atau penggunaan lahan (Briassoulis 2000). Penggunaan lahan disebut pula sebagai penggunaan tanah, yang menurut Sandy

(1999) merupakan terminologi yang sama dengan penggunaan ruang atau tata ruang.

Permasalahan lingkungan Kabupaten Banyuwangi berawal dari permasalahan spasial (keruangan). Masalah spasial ini meliputi tidak efisiennya penggunaan lahan tertentu, penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukkan serta tingginya konversi kawasan tidak terbangun menjadi terbangun. Permasalahan tata ruang ini berdampak pada permasalahan lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, longsor dan turunnya muka air tanah. Bila permasalahan lingkungan tersebut tidak dikaji secara menyeluruh maka kondisi wilayah Kabupaten Banyuwangi akan semakin parah. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang mengakibatkan permasalahan lingkungan yang serius dan perlu adanya solusi untuk kebijakan pembangunan kedepannya, oleh karena itu diperlukan adanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Percepatan pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman dikhawatirkan berakibat pada berkurangnya daya dukung lingkungan akibat konversi kawasan tidak terbangun menjadi terbangun. Perubahan fungsi lahan yang mengabaikan fungsi ekologis sekitarnya, dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan lahan, oleh karena itu, Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang sangat penting dalam implementasi rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyuwangi agar proses pembangunan dilakukan mempunyai nilai keberlanjutan sehingga dapat mencegah pembangunan yang tidak diinginkan dan mendorong terjadinya pembangunan. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi, serta memformulasikan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi ?
2. Bagaimana formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi.
2. Untuk memformulasikan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu :

a. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk dapat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam kurun waktu 20 tahun yang konsisten dan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk menetapkan strategi dan kebijakan penataan ruang yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang semakin meningkat dalam aktifitas pembangunan daerah.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya perencanaan wilayah yang berkaitan dengan perspektif teori pembangunan berkelanjutan yang merupakan sebuah paradigma yang bertujuan untuk

pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif merupakan gambaran mengenai situasi ataupun kejadian pada masa sekarang, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan analisis data yang dapat dihitung untuk memperoleh hasil penafsiran, sehingga memberikan informasi dalam membantu mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian (Hikmat, 2011).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive method*). Salah satu pertimbangan yang utama memilih Kabupaten Banyuwangi karena sebagai daerah yang memacu kegiatan pembangunan dalam segala bidang maka penting untuk melakukan pengendalian pembangunan demi terwujudnya fungsi dan manfaat keruangan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui serta mendeskripsikan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember 2019.

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini tokoh masyarakat dan LSM, pengusaha, pekerja, legislatif (DPRD) dan aparatur pemerintah. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling kuota*, yang artinya teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono 2011). Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 responden dengan masing-masing sub

kelompok sebanyak dengan kuota 5 responden. Responden dalam penelitian ini memiliki ciri - ciri sebagai berikut.

1. **Tokoh masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan** yang bertempat tinggal atau bermukim dekat dengan kawasan strategis bandara, industri dan pertambangan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan merasakan dampak terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah dijalankan pemerintah daerah.
2. **Pengusaha** adalah individu yang berusaha/berinvestasi dengan nilai investasi lebih dari 10 milyar di lokasi suatu kawasan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan fungsi kawasan akan tetapi tidak bermukim di lokasi tersebut.
3. **Pekerja** adalah individu yang bekerja meliputi pegawai atau karyawan pada suatu usaha perdagangan/jasa skala besar di kawasan strategis di Kabupaten Banyuwangi, dimana pekerja tersebut tidak bermukim di lokasi penelitian.
4. **DPRD** adalah perwakilan anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup pada DPRD Kabupaten Banyuwangi
5. **Aparatur pemerintah** adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait tata ruang, lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Perekonomian pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengambilan data primer berupa survei lapangan yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Pengumpulan data diperoleh melalui turun

langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Responden yang akan menjadi *key informan* merupakan penduduk, pengusaha, pekerja, legislatif (DPRD) dan aparatur pemerintah.

b. Data sekunder

Pengambilan data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak lain yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hal ini dapat berupa teknik pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dari menelaah buku, majalah atau surat kabar, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan bentuk tulisan lainnya yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang mendukung penulis dalam melengkapi data primer yang diperoleh, seperti data pengunjung, data lokasi, data penerimaan pendapatan, dan data-data yang berkaitan lainnya. Instansi yang dapat membantu dalam memperoleh data sekunder, diantaranya Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal vital dalam penelitian (Sugiyono, 2011). Penulis harus mampu mengetahui sumber data yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data akan diperoleh penulis dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi di Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh informasi yang didapatkan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden. Penentuan sumber data dan informasi dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, melalui penelaahan berbagai literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dokumen yang berkaitan dengan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Observasi atau penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi ini bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Ada beberapa variabel penelitian yang berkenaan dengan observasi ini, yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi. Yang terlibat dalam observasi ini peneliti dan penduduk, pengusaha, pekerja yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Kuesioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang harus dijawab dan diisi oleh responden sebagai sampel terpilih. Responden dalam penelitian ini yakni penduduk, pengusaha, pekerja, legislatif (DPRD) dan aparatur pemerintah.
- 4) Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat/LSM, pengusaha, pekerja, legislatif (DPRD) dan aparatur pemerintah.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang di tinjau dari

dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi dengan menggunakan analisis *Multidimensional scaling* (MDS) dengan metode *Rap-fish* (*Rapid Appraisal for Fisheries*) yang dimodifikasi menjadi *Rap-Regional Spatial Planning* (*Rapid Appraisal for Regional Spatial Planning*).

Untuk menjawab permasalahan kedua mengenai formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam rancangannya terhadap suatu masalah.

3.6.1 Analisis *RAP-Fish* (*Rapid Appraisal for Fisheries*) dengan metode *Multidimensional scaling* (MDS)

Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi akan ditinjau dari 6 dimensi diantaranya: dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi dengan menggunakan pendekatan *Multidimensional scaling* (MDS) yang merupakan pengembangan dari metode *Rapfish*. Metode *Rapfish* sebelumnya digunakan untuk menilai keberlanjutan perikanan tangkap (Fauzi, 2002). Dalam perkembangannya metode ini digunakan untuk berbagai kasus keberlanjutan lainnya. Analisis status keberlanjutan dengan menggunakan *Rap-Regional Spatial Planning* terdapat empat dimensi yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi. Keenam dimensi tersebut selanjutnya diolah dengan teknik *Multidimensional scaling* (MDS). Adapun tahapan analisis *Multidimensional scaling* (MDS) sebagai berikut (Nurmalina, 2008):

1. penentuan atribut-atribut dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi serta atribut-atribut dari setiap dimensi ditentukan oleh penetapan awal dari hasil wawancara dan survei;

2. penilaian setiap atribut dalam skala ordinal untuk mengetahui keberlanjutan di setiap dimensi;
3. penyusunan indeks dan status keberlanjutan pada lokasi kawasan penelitian berdasarkan skor yang telah diperoleh. Kategori tingkat keberlanjutan, yaitu: (a) tidak berkelanjutan dengan skor ≤ 25 ; (b) kurang berkelanjutan dengan skor 25-50; (c) cukup berkelanjutan dengan skor 50-75; (d) berkelanjutan dengan skor 75-100;
4. penentuan atribut-atribut pengungkit sensitif di setiap dimensi, atribut sensitif yaitu atribut yang memiliki peran besar dan dominan dalam menentukan nilai indeks tingkat keberlanjutan di setiap dimensi tersebut.

Tabel 3.1 Kategori Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Nilai Indeks Hasil Analisis *Rap- Regional Spatial Planning Ordination* dengan teknik MDS

Nilai Indeks	Status Keberlanjutan
0,00 – 25,00	Buruk (Tidak Berkelanjutan)
25,01 – 50,00	Kurang (Kurang Berkelanjutan)
50,01 – 75,00	Cukup (Cukup Berkelanjutan)
75,01 – 100,00	Baik (Sangat Berkelanjutan)

Sumber: Nuralina, 2008

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Rapfish* yang terpasang pada modus *add-ins* pada aplikasi *microsoft excel*. Terdapat tiga hal *running* program aplikasi, yaitu *Run Rapfish*, *Run Leverage*, dan *Run Monte Carlo* (Nuralina, 2008).

a. *Run Rapfish*

Run rapfish yang dimodifikasi menjadi *Rap-Regional Spatial Planning* digunakan untuk menentukan posisi yang keberlanjutan di setiap dimensi yang dikaji. Aplikasi ini menerapkan dua titik acuan, yaitu titik “baik” (*good*) dan titik “buruk” (*bad*). Titik acuan ini bertujuan untuk membantu penetapan posisi keberlanjutan yang akan sulit mengingat terdapatnya banyak atribut pada dimensi yang ada. MDS berfungsi melakukan standardisasi nilai skor untuk setiap atribut sehingga di setiap atribut memiliki bobot yang seragam dan perbedaan antarskala pengukuran dapat dihilangkan.

b. *Run Leverage*

Run leverage digunakan untuk mengukur atribut dalam penelitian dan dimunculkan dalam urutan besaran nilai *leverage*. Besaran nilai *leverage* menjadi dasar untuk menetapkan atribut faktor pengungkit atau faktor kunci di setiap dimensi. Faktor tingkat ketelitian dalam penelitian ini dapat dilihat dengan caramelakukan *run monte carlo*.

c. *Run Monte Carlo*

Monte carlo merupakan metode stimulasi statistik dalam pengevaluasian efek dari suatu *random error* pada proses serta memperkirakan tingkat kepercayaan dari suatu pengukuran. Analisis ini digunakan untuk memahami: (a) kesalahan dalam pembuatan skor di setiap atribut, (b) ragam pemberian skor akibat perbedaan opini, (c) kestabilan proses analisis yang dilakukan berulang, dan (d) kesalahan pemasukan data.

3.2 Atribut Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur dan teknologi

No	Atribut
Dimensi Ekologi	
1.	Kondisi dan kualitas lingkungan kawasan
2.	Luas sebaran lahan hijau
3.	Kondisi dan luas dataran tinggi
4.	Ketersediaan dan kualitas air
5.	Tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah
6.	Frekuensi terjadinya kekeringan
7.	Program konservasi dan penataan lahan hijau
8.	Perbandingan luas kawasan untuk pemanfaatan industri dengan RTH
9.	Perubahan fungsi kawasan dengan adanya pembangunan
10.	Pelaksanaan rehabilitasi lahan
11.	Konsisten penerapan aturan zonasi wilayah dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan kritis
Dimensi Ekonomi	
12.	Penciptaan peluang usaha
13.	Pengaruh terhadap pendapatan masyarakat
14.	Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta
15.	Nilai ekonomi lahan yang menjadi penetapan suatu kawasan
16.	Aktivitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri
17.	Kontribusi pembangunan kawasan terhadap PAD
18.	Program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan

19. Daya dukung dari keberadaan sarana pendukung pengelolaan kawasan hijau
20. Biaya pemeliharaan dan pemulihan kerusakan lingkungan
21. Program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan hijau

Dimensi Sosial

22. Tingkat penyerapan tenaga kerja
23. Hubungan masyarakat sekitar kawasan dengan pelaku industri
24. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial
25. Pengaruh pembangunan kawasan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat
26. Frekuensi konflik kesenjangan
27. Pengaruh terhadap peningkatan pendidikan
28. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai proses pengembangan
29. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan
30. Tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan

Dimensi Hukum dan Regulasi

31. Ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan
32. Kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup
33. Penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan
34. Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan
35. Konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat
36. Konflik antara pemegang usaha dengan para pihak
37. Kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan
38. Permasalahan ganti rugi lahan
39. Kepastian hukum dalam menjalankan usaha
40. Penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan

Dimensi Kelembagaan

41. Susunan dan manajemen pengelola dan perencana tata ruang
42. Kinerja SDM dalam mengelola dan menetapkan tata ruang
43. Peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan tata ruang wilayah
44. Cara pengelola dalam mengatasi kendala merencanakan tata ruang
45. Hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang
46. Strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis tata ruang
47. Keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan wilayah
48. Peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi

Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

49. Pemahaman tentang proses pemataan ruang berbasis GIS
50. Teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan
51. Teknik konservasi lahan
52. Kualitas jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha (seperti jalan angkut)
53. Teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang berkualitas
54. Pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha
55. Keberadaan sumber daya manusia pengawas dalam tata kelola tata ruang
56. Keberadaan program dan teknik pengembangan usaha

Sumber : Hasil Pengamatan didaerah penelitian di Kabupaten Banyuwangi (2019)

3.6.2 Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan teori umum mengenai pengukuran, metode ini ditunjukkan untuk mengambil keputusan yang sederhana dan fleksibel dalam rancangannya terhadap suatu masalah. Model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, ahli Matematika dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat distrik maupun kontinu. Perbandingan tersebut, dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran pengukuran relatif dari derajat kesukaan atau kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metode ini dapat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal – hal yang semula sulit diukur seperti, pendapat, perasaan, perilaku dan kepercayaan (Saaty, 1993). Selain itu Saaty, (1993) juga menyatakan bahwa pnggunaan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang diteliti. Dalam hirarki tersebut, terdapat tujuan utama, kriteria – kriteria, sub-kriteria, dan alternatif – alternatif. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. *Resiprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan
2. *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan semangka dengan bola basket dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. *Dependence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).
4. *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Analytical Hierarchy Process (AHP) telah banyak digunakan oleh para pengambil keputusan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti menetapkan prioritas, menghasilkan seperangkat alternatif, memilih alternatif, memilih alternatif kebijakan yang terbaik, menetapkan berbagai persyaratan, mengalokasikan sumber daya, meramalkan hasil dan menaksir risiko, mengukur prestasi, merancang sistem, merencanakan dan memecahkan konflik (Saaty, 1993).

Analytical Hierarchy Process (AHP) juga memasukan aspek kualitatif dan kuantitatif pikiran manusia (Saaty, 1993). Aspek kualitatif mendefinisikan persoalan dan hirarkinya dan aspek kuantitatif mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat. Proses ini dengan jelas menunjukkan bahwa demi pengambilan keputusan yang sehat dalam situasi yang kompleks, sehingga diperlukan menetapkan prioritas dan melakukan pertimbangan.

Menurut Saaty (1993) menjelaskan terdapat beberapa langkah dalam penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai suatu alat untuk memecahkan persoalan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah :

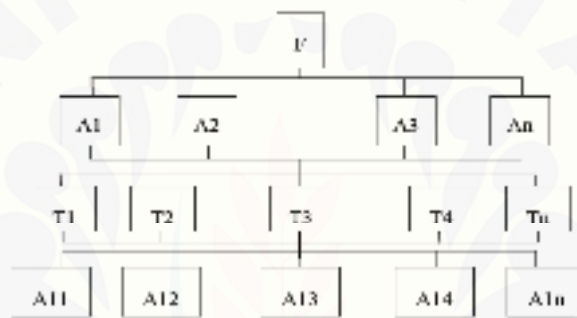
1. Mendefinisikan persoalan dan merinci pemecahan yang diinginkan.

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi persoalan dengan melakukan analisa atau pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Setelah itu dapat dilakukan pengidentifikasian dan pemilihan elemen – elemen yang akan masuk komponen sistem, seperti *focus*, *forces*, *actors*, *objectives* dan *scenario* dalam struktur *Analytical Hierarchy Process* (AHP) nantinya. Dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sendiri tidak terdapat prosedur yang pasti untuk mengidentifikasi komponen – komponen sistem. Komponen – komponen sistem dapat diidentifikasi berdasarkan kemampuan pada analisa untuk menemukan unsur – unsur yang dapat dilibatkan dalam suatu sistem.

2. Membuat struktur hirarki dari sudut pandang manajerial secara menyeluruh.

Hirarki merupakan suatu abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antar komponen dan dampaknya terhadap sistem. Abstraksi ini

mempunyai bentuk yang saling berkaitan. Dilihat dalam gambar 3.1 Struktur hirarki disusun berdasarkan jenis keputusan yang akan diambil berdasarkan sudut pandang dari tingkat puncak sampai ke tingkat dimana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan tersebut. Hirarki yang dapat terbentuk dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sendiri dapat berupa hirarki lengkap dan hirarki tak lengkap. Dalam struktur hirarki lengkap, semua elemen pada satu elemen pada satu tingkat memiliki hubungan dengan semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Pada struktur hirarki lengkap, jumlah tingkatan komponen sistem yang terdapat dalam hirarki tergantung pada pilihan peneliti.



Gambar 3.1. Struktur Hirarki Lengkap

3. Menyusun matriks banding berpasangan.

Matriks perbandingan berpasangan ini berfungsi untuk mengetahui kontribusi dan pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Pada matriks ini, pasangan – pasangan elemen dibandingkan berkenaan suatu kriteria di tingkat yang lebih tinggi. Dalam membandingkan dua elemen, biasanya memberi suatu pertimbangan yang menunjukkan dominasi sebagai bilangan bulat. Matriks ini memiliki satu tempat untuk memasukkan bilangan itu dan satu tempat lain untuk memasukkan nilai resiprokalnya.

4. Mendapatkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat matriks dilangkah 3.

Setelah matriks pembandingan berpasangan antar elemen dibuat, dilakukan pembandingan berpasangan antar setiap elemen pada kolom ke-i dengan setiap elemen pada baris ke-j. Pembandingan berpasangan antar elemen tersebut

dilakukan dengan pertanyaan “seberapa kuat elemen baris ke-i didominasi atau dipengaruhi, dipenuhi, diuntungkan oleh fokus di puncak hirarki, dibandingkan dengan kolom ke-j?”. Apabila elemen-elemen yang dipertimbangkan merupakan sebuah peluang atau waktu, maka pertanyaannya adalah “seberapa lebih mungkin suatu elemen baris ke-i dibandingkan dengan elemen dipuncak hirarki?”. Untuk mengisi matriks banding berpasangan, digunakan skala banding yang tertera pada Tabel 10. Angka – angka yang tertera menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya sehubungan dengan sifat kriteria tertentu. Pengisian matriks hanya dilakukan untuk bagian diatas garis diagonal dari kiri ke kanan bawah.

Tabel 3.2 Nilai Skala Banding Berpasangan

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas elemen lainnya
5	Elemen yang satu sangat penting daripada elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lainnya memiliki tingkat penegasan yang tertinggi yang mungkin menguatkan
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lainnya memiliki tingkat penegasan yang tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai diantara duapertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperhatikan diantara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika aktivitas I mendapatkan satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan bila dibandingkan dengan i	

5. Memasukkan nilai – nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang diagonal utama.

Angka 1 sampai 9 digunakan bila F_i lebih mendominasi atau mempengaruhi sifat fokus puncak hirarki (x) dibandingkan dengan F_j , namun bila F_i kurang mendominasi atau kurang mempengaruhi sifat X dibandingkan F_j ,

maka digunakan angka kebalikannya. Matriks dibawah garis diagonal utama diisi dengan nilai-nilai kebalikannya. Contoh, bila elemen F_{24} memiliki nilai 7, maka nilai elemen F_{42} adalah $1/7$.

6. Melaksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hirarki tersebut.

Pembandingan dilanjutkan untuk semua elemen pada setiap tingkat keputusan yang terdapat pada hirarki, berkenaan dengan kriteria elemen di atasnya. Matriks perbandingan dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dibedakan menjadi dua yaitu : Matriks Pendapat Individu (MPI) dan Matriks Pendapat Gabungan (MGP).

a. Matriks Pendapat Individu (MPI)

MPI adalah matriks hasil pembandingan yang dilakukan individu. MPI memiliki elemen yang disimbolkan dengan a_{ij} , yaitu elemen matriks pada baris kolom ke- i dan kolom ke- j . MPI dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Matriks Pendapat Individu

X	A1	A2	An
A1	a_{11}	a_{12}	A_{1n}
A2	a_{21}	a_{22}	A_{2n}
.....
An	a_{n1}	a_{n1}	A_{nn}

b. Matriks Pendapat Gabungan (MPG)

MPG adalah susunan matriks baru yang elemen (g_{ij}) berasal dari rata-rata geometrik pendapat-pendapat individu yang rasio inkonsistensinya lebih kecil atau sama dengan 10% dan setiap elemen pada baris dan kolom yang sama dari MPI yang satu dengan MPI yang lain tidak terjadi konflik. MPG dapat dilihat dari tabel 3.4.

Tabel 3.4. Matriks Pendapat Gabungan

X	G1	G2	Gn
G1	g_{11}	g_{12}	G_{1n}
G2	g_{21}	g_{22}	G_{2n}
.....
Gn	g_{n1}	g_{n1}	G_{nn}

Rumus rata-rata geometrik adalah sebagai berikut :

$$g_{ij} = \sqrt[k-1]{\prod_{k=1}^n a_{ij}(k)}$$

Dimana n : Jumlah Responden (Pakar)

$g_{ij}(k)$: sel penilaian tiap pakar

7. Menggunakan komposisi secara hirarki untuk membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria dan menjumlahkan semua nilai prioritas terbobot yang bersangkutan dengan nilai prioritas dari tingkat bawah berikutnya dan seterusnya. Adapun rumus vektor prioritas :

Vektor Prioritas (VP) =

$$\frac{VE}{\sum \sqrt[n]{\prod a_{ij}}}$$

Vektor Eigen (VE) =

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_{ij}}$$

Dimana :

a_{ij} : Elemen MPI pada baris ke-I dan kolom ke -j

n : Jumlah elemen yang diperbandingkan Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hirarki.

8. Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hirarki.

Pengukuran konsistensi ini diperlukan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang berpengaruh terhadap kesahihan hasil. Langkah yang digunakan yaitu dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak, yang sesuai dengan dimensi

masing-masing matriks. Dengan cara yang sama setiap indeks konsistensi acak dibobot berdasarkan prioritas kriteria bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Rasio konsistensi hirarki harus 10% atau kurang. Jika tidak, mutu informasi harus diperbaiki, antara lain dengan memperbaiki pertanyaan ketika melakukan pengisian ulang kuesioner atau lebih baik dalam mengarahkan responden yang mengisi kuesioner. Namun batasan diterima atau tidaknya konsistensi suatu matriks sebenarnya tidak ada yang baku, seperti Fewidarto (1996) menjelaskan bahwa jika tingkat inkonsistensi sebesar 10% kebawah tidak dicapai maka dapat digunakan batas yang lebih besar atau bahkan rata-rata CR penilaian pakar. Rumus untuk perhitungan uji konsistensi adalah sebagai berikut:

a. CI (Indeks Konsistensi)

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Dimana :

CI : Indeks Konsistensi

λ_{\max} : *eigen value* maksimum

n : Jumlah elemen yang diperbandingkan

b. VB (Nilai Eigen)

$$\frac{VA}{VP}$$

c. VA (Vektor Antara)

$$a_{ij} \times VP$$

Lebih lanjut ingin diketahui apakah CI dengan besaran cukup baik atau tidak, maka perlu diketahui rasio konsistensinya (CR) yaitu :

d. CR (Rasio Konsistensi)

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

RI adalah indeks acak yang dikeluarkan oleh Oak Ridge Laboratory, dari matrik berorde 1 sampai 15 dengan menggunakan sample berukuran 100. Tabel RI tersebut seperti pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Indeks Acak

	1	2	3	4	5	6	7
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32
N	8	9	10	11	12	13	14
RI	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57

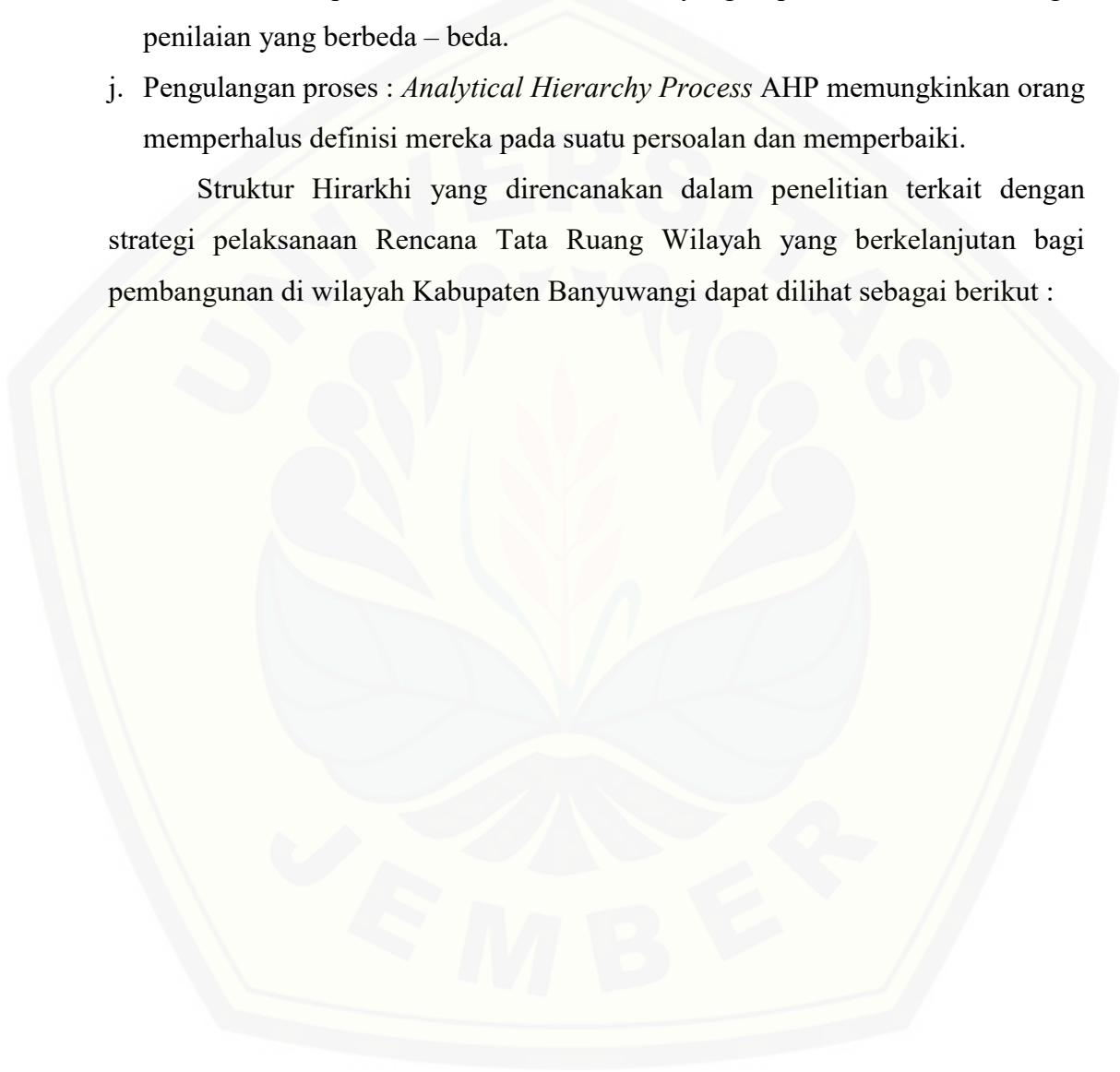
9. Keuntungan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

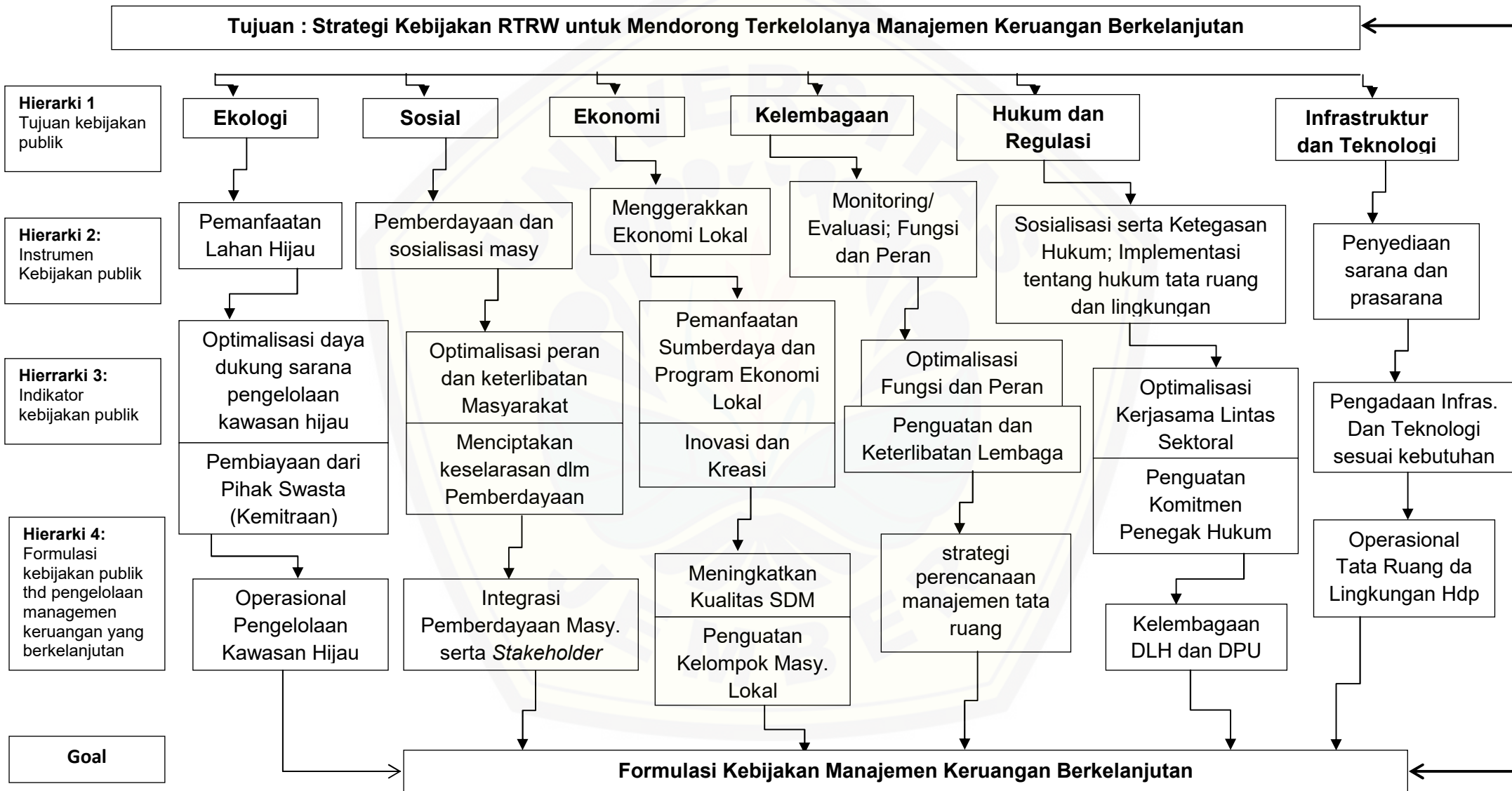
Secara umum, keuntungan penggunaan metode *Analytical Hierarchy Process* AHP dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Ma'arif dan Tanjung, 2003) :

- a. Kesatuan: *Analytical Hierarchy Process* (AHP) memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur.
- b. Kompleksitas: *Analytical Hierarchy Process* (AHP) memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan.
- c. Saling ketergantungan: *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tak memaksakan pemikiran linier.
- d. Penyusunan hirarki: *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
- e. Pengukuran: *Analytical Hierarchy Process* (AHP) memberi suatu skala untuk mengukur objek dalam wujud suatu metode untuk menetapkan prioritas.
- f. Konsistensi: *Analytical Hierarchy Process* AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
- g. Sintesis: *Analytical Hierarchy Process* AHP menuntun pada suatu taksiran yang menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

- h. Tawar – menawar: *Analytical Hierarchy Process* AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
- i. Penilaian dan consensus: *Analytical Hierarchy Process* AHP tak memaksakan konsensus, tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda – beda.
- j. Pengulangan proses : *Analytical Hierarchy Process* AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki.

Struktur Hirarkhi yang direncanakan dalam penelitian terkait dengan strategi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkelanjutan bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat sebagai berikut :





Keterangan diagram :

Goal : Merupakan tujuan yang akan dicapai yaitu menyusun formulasi kebijakan Tata Ruang Wilayah untuk mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level I : Tujuan Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level II : Instrumen dari Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level III : Indikator dari Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level IV : Formulasi Kebijakan Publik dari Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Skala Prioritas dari Formulasi Kebijakan Publik yang mendukung terhadap pengembangan dan keberlanjutan terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Kelembagaan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
2. Operasional Pengelolaan Kawasan Hijau
3. Pemberdayaan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lokal
4. Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keruangan
5. Operasional Tata Ruang dan Kawasan Hijau

3.7 Definisi Operasional

1. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum
2. Keberlanjutan merupakan suatu kondisi dimana sebuah usaha bidang perikanan masih bisa berlanjut kedepannya untuk diusahakan kembali.
3. Atribut merupakan suatu acuan untuk melihat kondisi dalam masyarakat berdasarkan dimensi yang ada.
4. Analisis *Rap-Regional Spatial Planning (Rapid Appraisal for Regional Spatial Planning)* adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis keberlanjutan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
5. *Multi-dimensional scaling (MDS)* adalah penggambaran skor dari atribut yang terdapat pada masing-masing dimensi *Rap-Regional Spatial Planning* yang akan dianalisis.
6. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* adalah suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel untuk menentukan kebijakan yang sesuai dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
7. Dimensi ekologi terdiri dari 11 atribut keberlanjutan, antara lain: kondisi dan kualitas lingkungan kawasan, luas sebaran lahan hijau, kondisi dan luas dataran tinggi, ketersediaan dan kualitas air, tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah, frekuensi terjadinya kekeringan, program konservasi dan penataan lahan hijau, perbandingan luas kawasan untuk pemanfaatan industri dengan RTH, perubahan fungsi kawasan dengan adanya pembangunan, pelaksanaan rehabilitasi lahan, dan konsisten penerapan aturan zonasi wilayah dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan kritis.

8. Dimensi ekonomi terdiri dari 10 atribut keberlanjutan, antara lain: penciptaan peluang usaha, pengaruh terhadap pendapatan masyarakat, pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta, nilai ekonomi lahan yang menjadi penetapan suatu kawasan, aktivitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri, kontribusi pembangunan kawasan terhadap PAD, program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan, daya dukung dari keberadaan sarana pendukung pengelolaan kawasan hijau, biaya pemeliharaan dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan hijau.
9. Dimensi sosial terdiri dari 9 atribut keberlanjutan, antara lain: tingkat penyerapan tenaga kerja, hubungan masyarakat sekitar kawasan dengan pelaku industri, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, pengaruh pembangunan kawasan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat, frekuensi konflik kesenjangan, pengaruh terhadap peningkatan pendidikan, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai proses pengembangan, persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan serta tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan.
10. Dimensi hukum dan regulasi terdiri dari 10 atribut keberlanjutan, antara lain: ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan, kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup, penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan, konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat, konflik antara pemegang usaha dengan para pihak, kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan, permasalahan ganti rugi lahan, kepastian hukum dalam menjalankan usaha, dan penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan.
11. Dimensi kelembagaan terdiri dari 8 atribut keberlanjutan, diantaranya: bagaimana susunan dan manajemen pengelola dan perencana tata ruang, kinerja SDM dalam mengelola dan menetapkan tata ruang, peran lembaga

pemerintah terhadap pengelolaan tata ruang wilayah, cara pengelola dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang, strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis tata ruang, keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan wilayah, dan peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi.

12. Dimensi infrastruktur dan teknologi terdiri dari 8 atribut keberlanjutan, diantaranya: pemahaman tentang proses pemataan ruang berbasis GIS, teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan, teknik konservasi lahan, kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha (seperti jalan angkut), teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang berkualitas, pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha, keberadaan sumber daya manusia pengawas dalam tata kelola tata ruang dan keberadaan program dan teknik pengembangan usaha.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi secara multidimensi berada pada status cukup berkelanjutan dengan nilai indeks status keberlanjutan sebesar 74,03, nilai tersebut berada pada skala ordinasi 60,01 – 75,00, Artinya dengan nilai indeks tersebut semua dimensi meliputi: dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi yaitu dimensi ekonomi, jika dibandingkan dengan dimensi - dimensi lainnya (ekologi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan infrastruktur dan teknologi). Dimensi ekonomi memiliki nilai indeks keberlanjutan yang paling tinggi dan memiliki peluang besar dalam peningkatan status keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Hasil dari *Analytical Hierarchy Process* menunjukkan bahwa strategi prioritas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi adalah aspek kelembagaan. Sehingga diperlukan peran dan fungsi kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang, melalui penyempurnaan struktur lembaga/organisasi, peningkatan kompetensi SDM perencana, kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tata ruang.

5.2 Saran

1. Untuk menjamin status keberlanjutan tata ruang di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirasa perlu menjadikan dimensi ekonomi sebagai prioritas utama dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah. Pada praktek pemanfaatan ruang, diharapkan setiap pembangunan kawasan harus mempertimbangkan atribut-atribut pendukung dimensi ekonomi, antara lain berupa penciptaan peluang usaha baru bagi warga lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, nilai ekonomi lahan, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan program pengembangan masyarakat.
2. Untuk menguatkan peran kelembagaan dalam manajemen keruangan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya perencana pada perangkat daerah terkait tata ruang dan lingkungan, mengintegrasikan regulasi tata ruang dengan regulasi perizinan berusaha pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meningkatkan intensitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata ruang dengan pembentukan Tim Tinjau Lapang Terpadu, serta mengintegrasikan arsitektur bangunan dengan kebijakan dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Archibugi, F. (2008). *Planning Theory From the Political Debate to the Methodological Reconstruction*. London: Sage Publication.
- Biesbroek, G., Swart, R., & Knaap, W. V. (2009). The mitigation adaptation dichotomy and the role of spatial planning. *Habitat international*, 33(3), 230-237.
- Briassoulis, H. (2000). *Analysis of land Use Change, Theoretical and Modeling*. Regional Research Institute: West Virginia University.
- Brooks, M. P. (2002). *Planning Theory for Practitioners, American Planning Association*. Chicago.
- Budiharjo, E., & Sujarto, D. (2005). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni Research Triangle Institute.
- Budimanta, A. (2005). *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta: ICSD.
- Conyers, D., & Hills, P. (1987). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Brisbane: John Willey & Sons.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi*. Kabupaten Banyuwangi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2017). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Dickenson, J. (1992). *Geografi Negara Berkembang*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Djajadiningrat, S. (1992). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Membangun Tanpa Merusak Lingkungan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. *Planning practice and Research*, 15(4), 299 - 318.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fewidarto, P. (1996). *Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process)*. Bogor: Materi Kursus Singkat: Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Fleischhauer, M. (2008). The role of spatial planning in strengthening urban resilience In Resilience of Cities to Terrorist and other Threats. *Springer Science*, 10, 273 - 298.
- Friedman, J. (1987). *Planning in The Public Domain*. Oxford: Princeton University Press.
- Friedman, J. (2003). Why Do Planning Theory? *Planning Theory*, 2(1), 7 - 10.
- Grunkemeyer, W., & Moss, M. (2012). *Key Concepts in Sustainable Development*. West Virginia: Regional Research Institute West Virginia University.
- Haeruman, H. (2004). *Penataan Ruang dalam Era Otonomi Daerah yang Diperluas*. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (1 Desember 2004).
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning Shaping Places in Fragmented Societies*. London: Macmillan Press.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imran, S. Y. (2013). Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 457 - 467.
- IUCN, UNEP, & WWF. (1993). *Bumi, Wahana Strategi Menuju Kehidupan yang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jayadinata. (1992). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Kota dan Wilayah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung ITB.
- Jeong, J. S. (2016). Spatial Planning and Sustainable Development Measuring Regional Geographical Characteristics towards Ecotourism in Spanish Rural Housings. *Wseas Transactions on Enviroment and Development*, 12, 290 -298.

- Jhingan, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. (2017). *Kajian lingkungan hidup strategis*. Jakarta: Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
- Korosewa, A., & Konvitz, J. (2001). *Towards a new role for spatial planning*. Paris: OECD.
- Kuhlman, T. (2010). What is Sustainability? *journal sustainability*, 2(11), 3436 - 3448.
- Lestari, I. D. (2015). *Kajian Persediaan Baan Baku dan Keberlanjutan Agroindustri Tape di Kabupaten Jember*. Skripsi: Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Ma'arif, M. S., & Tanjung, H. (2003). *Teknik-teknik Kuantitatif untuk Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Masik, A. (2005). Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16(3), 1 - 23.
- Munir, R. (2002). *Merencana di Tengah Jerat Hutang, dalam Winarso, 2002, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*. Bandung: Departemen Teknik Planologi, ITB.
- Newman, P., & Jennings, I. (2012). *Cities as sustainable ecosystems: principles and practices*. Washington D.C.: Island Press.
- Nurmalina, R. (2008). Analisis Indeks Dan Status Keberlanjutan Sistem Ketersediaan Beras Di Beberapa Wilayah Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(1), 47 -79.
- Nurmandi, A. (1999). *Manajemen Perkotaan Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Pearce, D., & Wardford, J. (1993). *World Without End, Economics, Development*. Oxford University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah*. (t.thn.).
- Puspita, I. B. (2017). Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang yang Ramah Lingkungan melalui Analisis Emisi Berbasis Lahan. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 1(3), 1 - 9.

- Ramandey, L. (2017). Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah di Kabupaten Waropen Papua Indonesia. *Jurnal Presepitasi*, 14(1), 37 - 40.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Strategi Menggali Potensi dan Mewujudkan Otonomi Daerah*. Bandung: Gramedia.
- Roggema, R. (2009). *Adaptation to climate change: a spatial challenge*. Netherland: Springer Netherlands.
- Rozikin, M. (2012). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 219 - 243.
- Saaty, T. L. (1993). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.
- Sandercock, L. (1998). *Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Citie*. John Wiley & Sons Ltd, : Brisbane.
- Sandy, I. M. (1999). *Penataan Ruang dalam Pembangunan Geografi dan Penerapannya dalam Pembangunan Wilayah* . Jurusan Geografi FMIPA: UI Depok.
- Statistik, B. P. (2015). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka*. Kabupaten Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhono. (2004). *Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develoment) dalam Perubahan Lingkungan Global*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Surd, V., Constatin, V., & Maria, C. (2011). Strategic vision and concept of regional planning and sustainable development in Romania based on the use of geospatial solutions. *International Journal of Energy and Enviroment*, 5(1), 91 - 101.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Taylor, N. (2000). *Urban Planning Theory Since 1945*. London: Sage Publications.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (t.thn.).

Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B., & Widyoseno, Y. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Daya Lingkungan Berbasis Kemampuan lahan. *Agritech*, 14(1), 463 - 472.

Yakin, G. (2014). Urban activities in the view of the sustainable development. *Procedia Technology*, 12, 554 - 557.

LAMPIRAN

Lampiran A. Atribut Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur dan teknologi

No	Atribut
Dimensi Ekologi	
1.	Kondisi dan kualitas lingkungan kawasan
2.	Luas sebaran lahan hijau
3.	Kondisi dan luas dataran tinggi
4.	Ketersediaan dan kualitas air
5.	Tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah
6.	Frekuensi terjadinya kekeringan
7.	Program konservasi dan penataan lahan hijau
8.	Perbandingan luas kawasan untuk pemanfaatan industri dengan RTH
9.	Perubahan fungsi kawasan dengan adanya pembangunan
10.	Pelaksanaan rehabilitasi lahan
11.	Konsisten penerapan aturan zonasi wilayah dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan kritis
Dimensi Ekonomi	
12.	Penciptaan peluang usaha
13.	Pengaruh terhadap pendapatan masyarakat
14.	Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta
15.	Nilai ekonomi lahan yang menjadi penetapan suatu kawasan
16.	Aktivitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri
17.	Kontribusi pembangunan kawasan terhadap PAD
18.	Program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan
19.	Daya dukung dari keberadaan sarana pendukung pengelolaan kawasan hijau
20.	Biaya pemeliharaan dan pemulihan kerusakan lingkungan
21.	Program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan hijau
Dimensi Sosial	
22.	Tingkat penyerapan tenaga kerja
23.	Hubungan masyarakat sekitar kawasan dengan pelaku industri
24.	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial
25.	Pengaruh pembangunan kawasan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat
26.	Frekuensi konflik kesenjangan
27.	Pengaruh terhadap peningkatan pendidikan
28.	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai proses pengembangan
29.	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan
30.	Tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan

Dimensi Hukum dan Regulasi

31. Ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan
32. Kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup
33. Penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan
34. Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan
35. Konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat
36. Konflik antara pemegang usaha dengan para pihak
37. Kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan
38. Permasalahan ganti rugi lahan
39. Kepastian hukum dalam menjalankan usaha
40. Penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan

Dimensi Kelembagaan

41. Susunan dan manajemen pengelola dan perencana tata ruang
42. Kinerja SDM dalam mengelola dan menetapkan tata ruang
43. Peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan tata ruang wilayah
44. Cara pengelola dalam mengatasi kendala merencanakan tata ruang
45. Hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang
46. Strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis tata ruang
47. Keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan wilayah
48. Peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi

Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

49. Pemahaman tentang proses pemataan ruang berbasis GIS
 50. Teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan
 51. Teknik konservasi lahan
 52. Kualitas jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha (seperti jalan angkut)
 53. Teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang berkualitas
 54. Pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha
 55. Keberadaan sumber daya manusia pengawas dalam tata kelola tata ruang
 56. Keberadaan program dan teknik pengembangan usaha
-

Lampiran B. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Ekologi.

B.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Ekologi



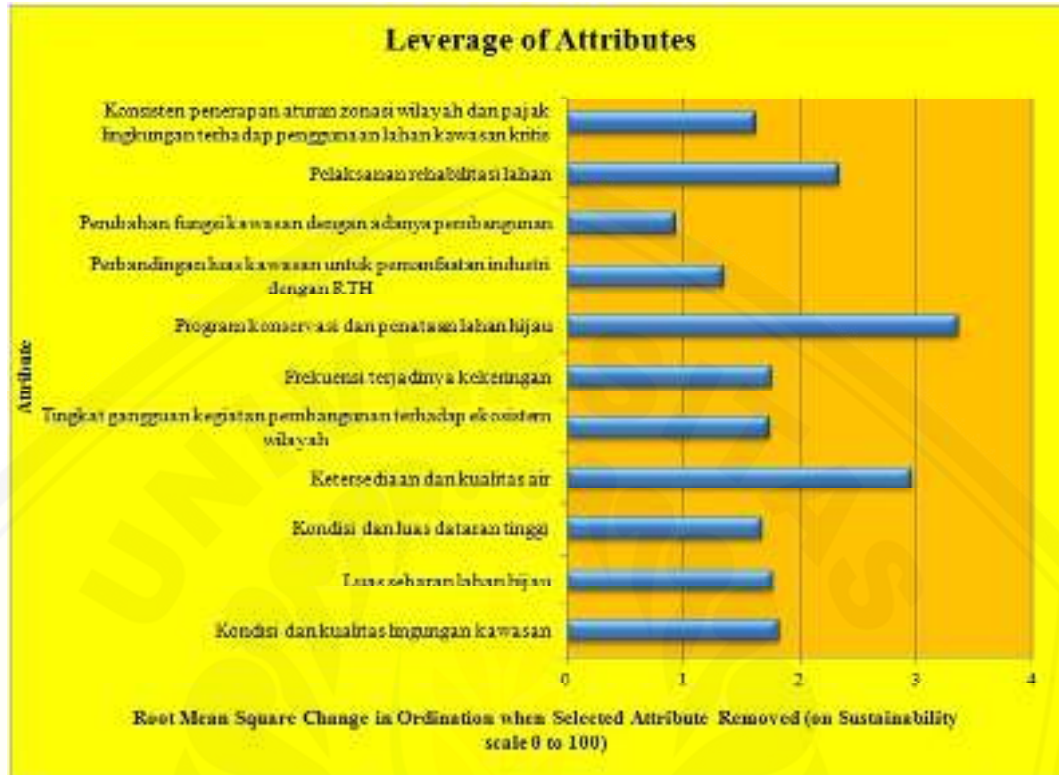
Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 68,07 (Cukup Keberlanjutan)

Nilai *Stress* = 0,13

Nilai R^2 = 0,95

B.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Ekologi



B.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Ekologi

No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Kondisi dan kualitas lingkungan kawasan	1,82	Tidak Sensitif
2	Luas sebaran lahan hijau	1,77	Tidak Sensitif
3	Kondisi dan luas dataran tinggi	1,67	Tidak Sensitif
4	Ketersediaan dan kualitas air	2,96	Sensitif
5	Tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah	1,75	Tidak Sensitif
6	Frekuensi terjadinya kekeringan	1,75	
7	Program konservasi dan penataan lahan hijau	3,36	Sensitif
8	Perbandingan luas kawasan untuk pemanfaatan industri dengan RTH	1,34	Tidak Sensitif
9	Perubahan fungsi kawasan dengan adanya pembangunan	0,93	Tidak Sensitif
10	Pelaksanaan rehabilitasi lahan	2,34	Sensitif
11	Konsisten penerapan aturan zonasi wilayah dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan kritis	1,63	Tidak Sensitif

Lampiran C. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Ekonomi

C.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Ekonomi

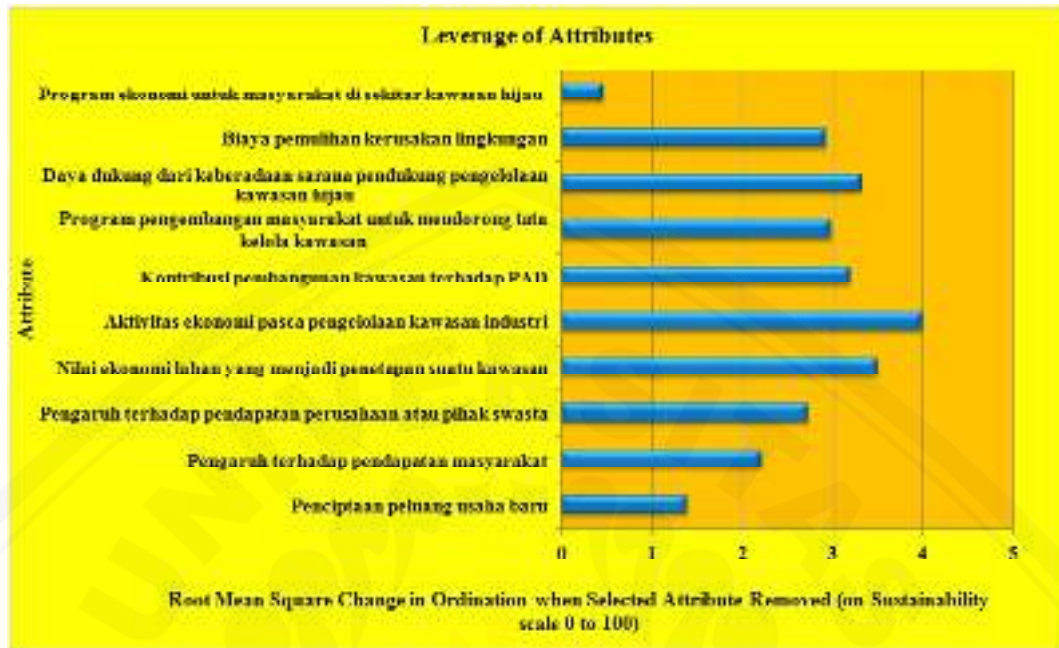


Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 78,01 (Sangat Keberlanjutan)

Nilai *Stress* = 0,13

Nilai R^2 = 0,95

C.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Ekonomi

C.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Ekonomi

No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Penciptaan peluang usaha	1,39	Tidak Sensitif
2	Pengaruh terhadap pendapatan masyarakat	2,22	Sensitif
3	Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta	2,72	Sensitif
4	Nilai ekonomi lahan yang menjadi penetapan suatu kawasan	3,49	Sensitif
5	Aktivitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri	3,98	Sensitif
6	Kontribusi pembangunan kawasan terhadap PAD	3,19	Sensitif
7	Program pengembangan masyarakat untuk mendorong tata kelola kawasan	2,98	Sensitif
8	Daya dukung dari keberadaan sarana pendukung pengelolaan kawasan hijau	3,31	Sensitif
9	Biaya pemeliharaan dan pemulihan kerusakan lingkungan	2,92	Sensitif
10	Program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan hijau	0,46	Tidak Sensitif

Lampiran D. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Sosial

D.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Sosial

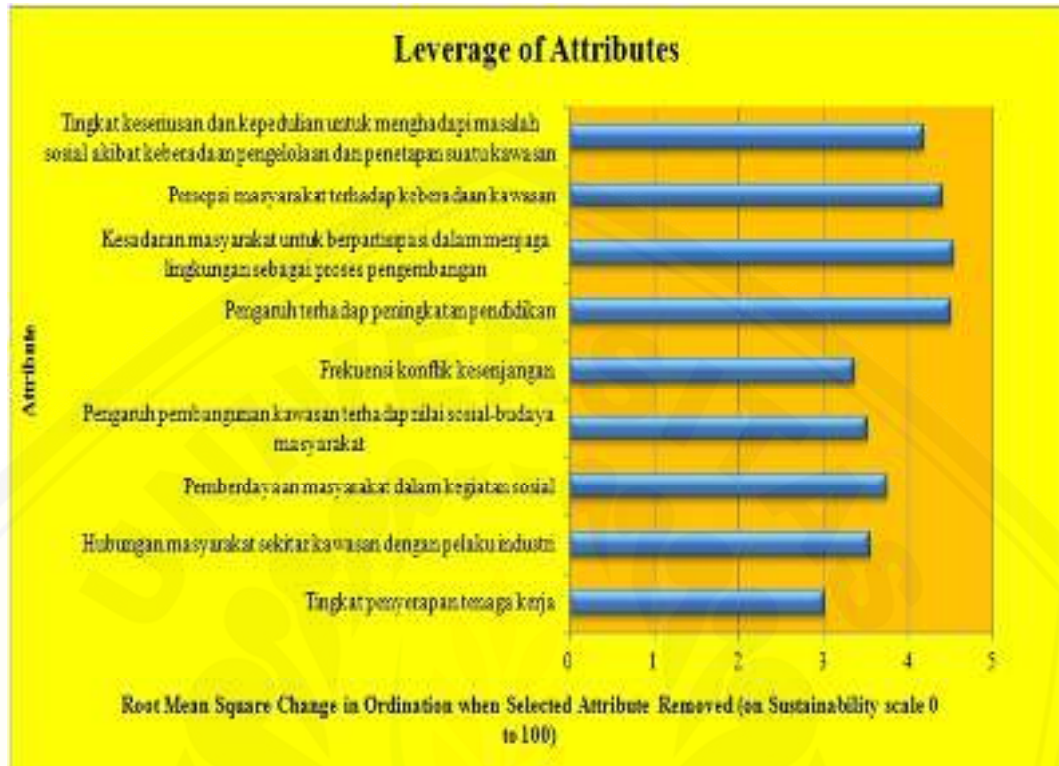


Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 77,77 (Sangat Keberlanjutan)

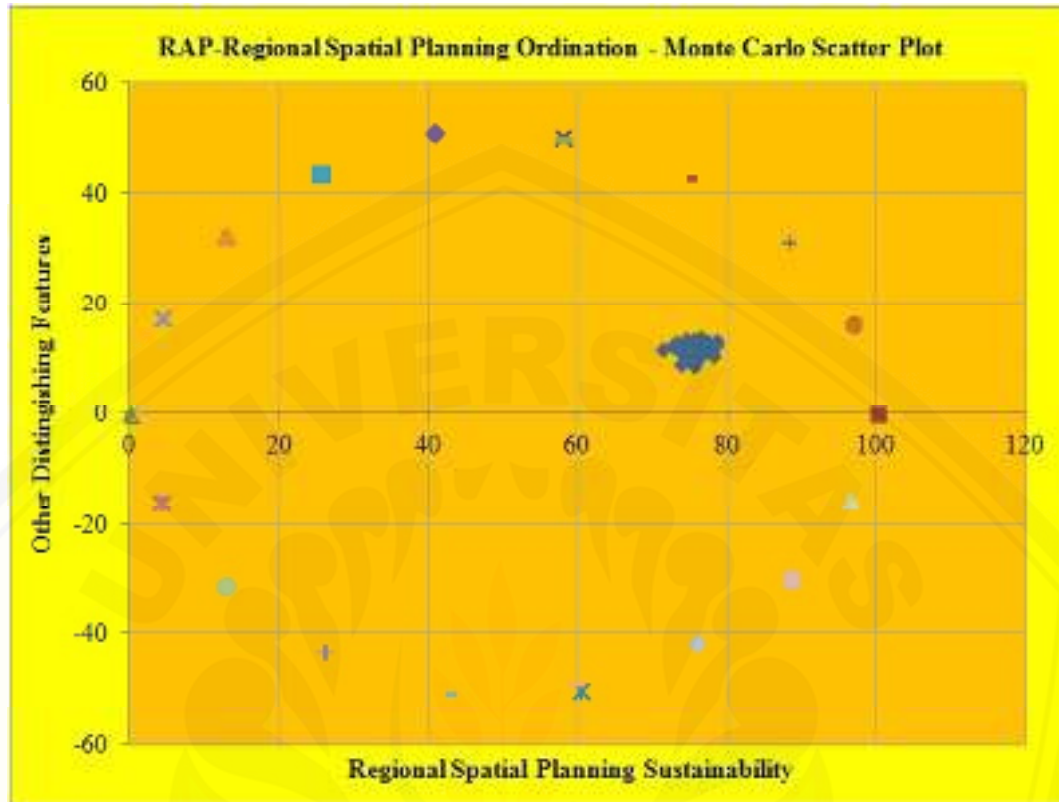
Nilai *Stress* = 0,13

Nilai R^2 = 0,95

D.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Sosial

D.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Sosial

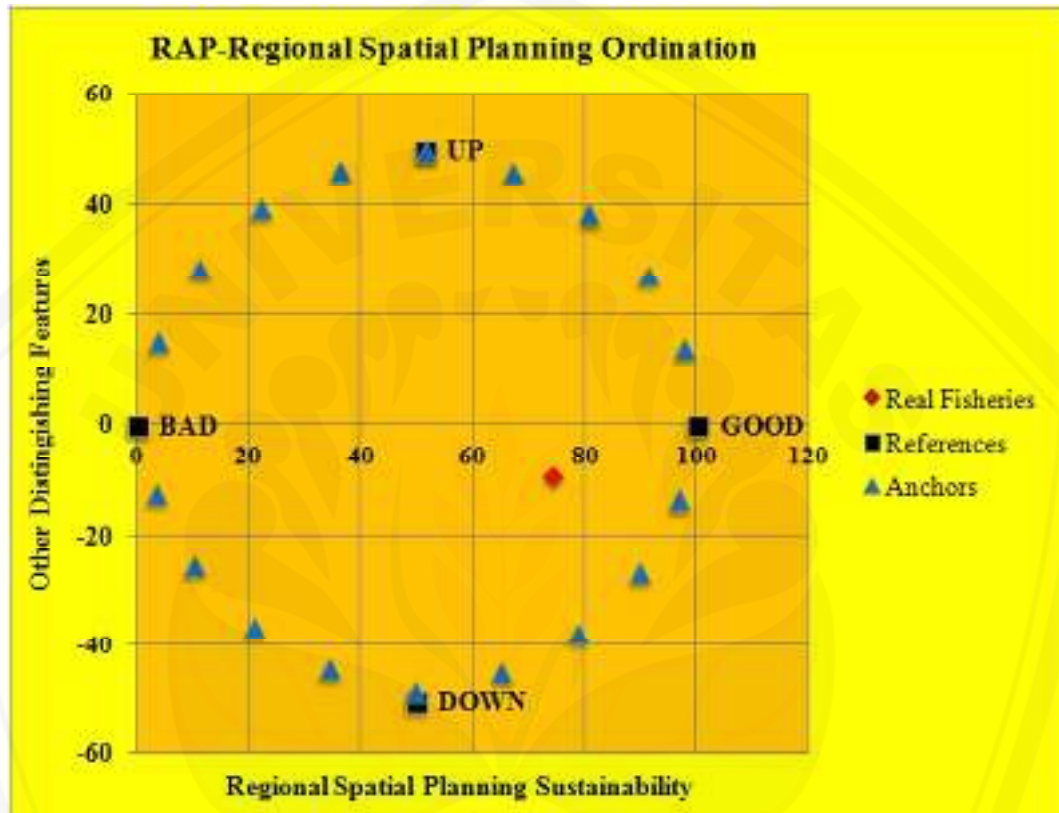
No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Tingkat penyerapan tenaga kerja	3,01	Sensitif
2	Hubungan masyarakat sekitar kawasan dengan pelaku industri	3,55	Sensitif
3	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial	3,75	Sensitif
4	Pengaruh pembangunan kawasan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat	3,51	Sensitif
5	Frekuensi konflik kesenjangan	3,36	Sensitif
6	Pengaruh terhadap peningkatan pendidikan	4,51	Sensitif
7	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai proses pengembangan	4,53	Sensitif
8	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan serta tingkat keseriusan	4,40	Sensitif
9	Tingkat Keseriusan dan Kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan	4,18	Sensitif

D.4 Hasil analisis *Monte Carlo* pada Dimensi Sosial

Titik pusat evaluasi keberlanjutan pada dimensi sosial berada antara nilai 71,45 – 78,24.

Lampiran E. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Hukum dan Regulasi

E.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Hukum dan Regulasi

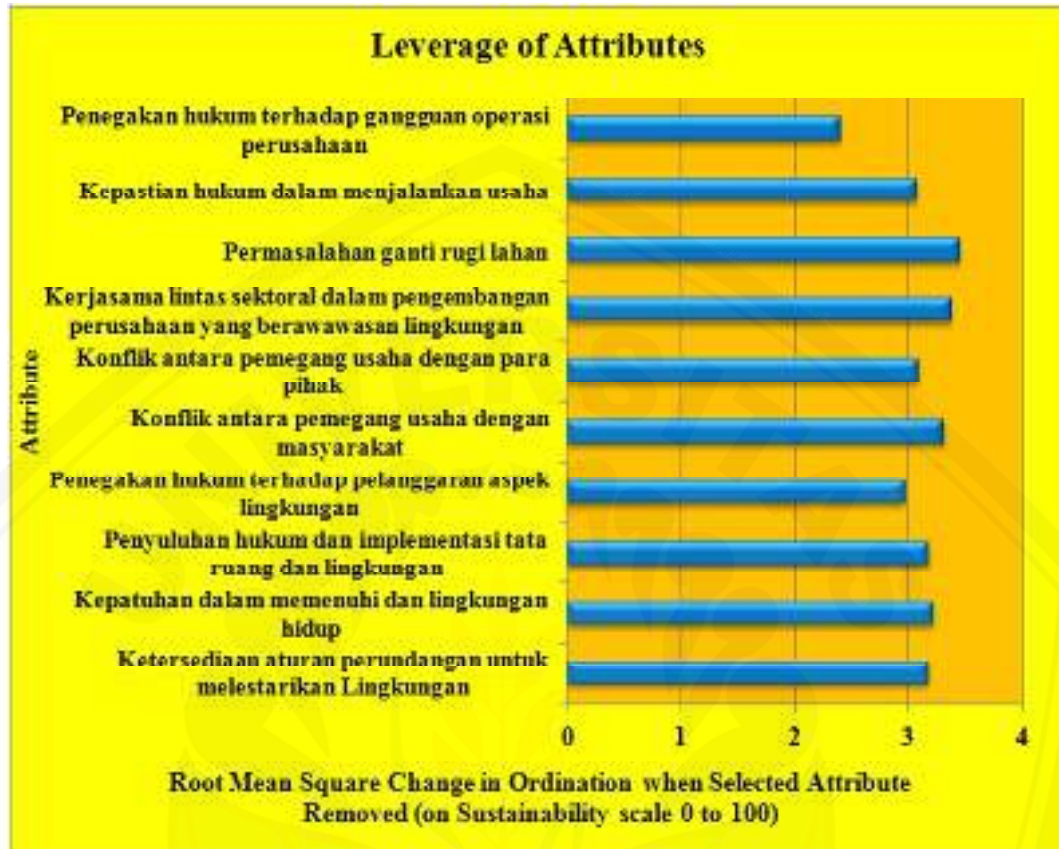


Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 74,31 (Cukup Keberlanjutan)

Nilai *Stress* = 0,13

Nilai R^2 = 0,95

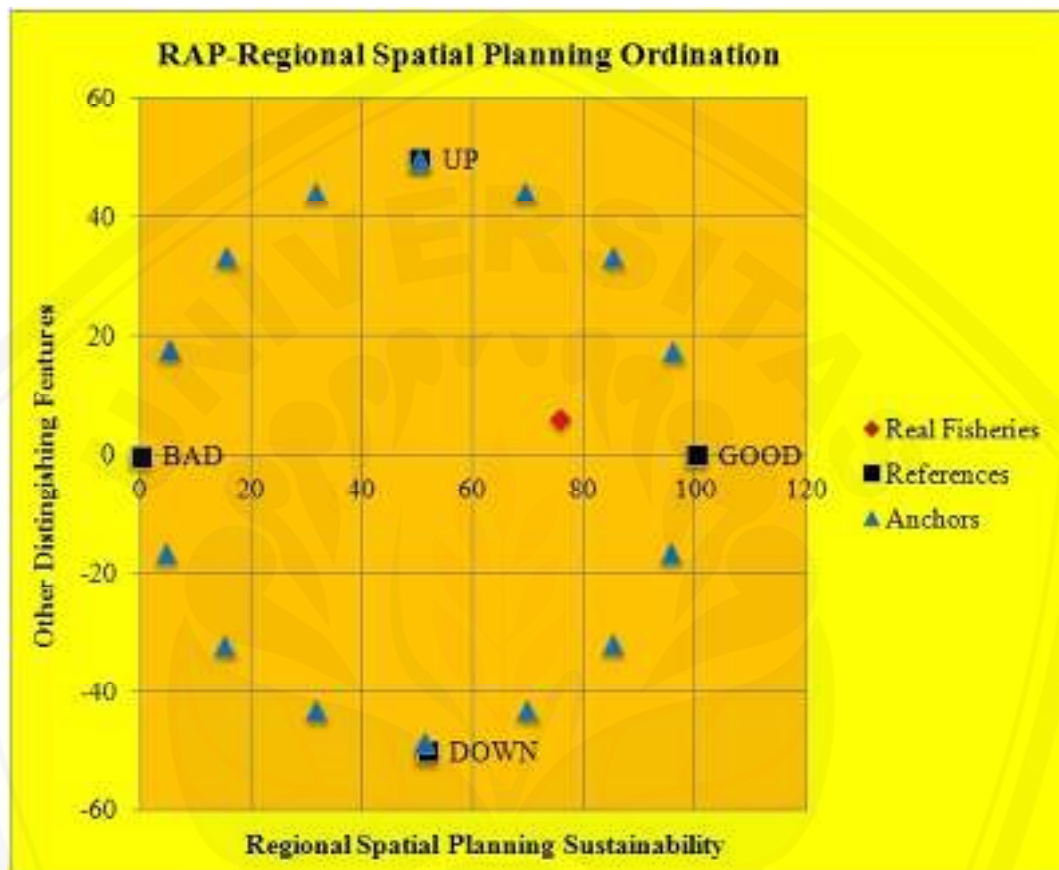
E.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Hukum dan Regulasi

E.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Hukum dan Regulasi

No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan lingkungan	3,17	Sensitif
2	Kepatuhan dalam memenuhi dan menjaga lingkungan hidup	3,22	Sensitif
3	Penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan	3,18	Sensitif
4	Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan	2,96	Sensitif
5	Konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat	3,31	Sensitif
6	Konflik antara pemegang usaha dengan para pihak	3,08	Sensitif
7	Kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan usaha yang berawawasan lingkungan	3,38	Sensitif
8	Permasalahan ganti rugi lahan	3,45	Sensitif
9	Kepastian hukum dalam menjalankan usaha	3,07	Sensitif
10	Penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan	2,40	Sensitif

Lampiran F. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Kelembagaan

F.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Kelembagaan

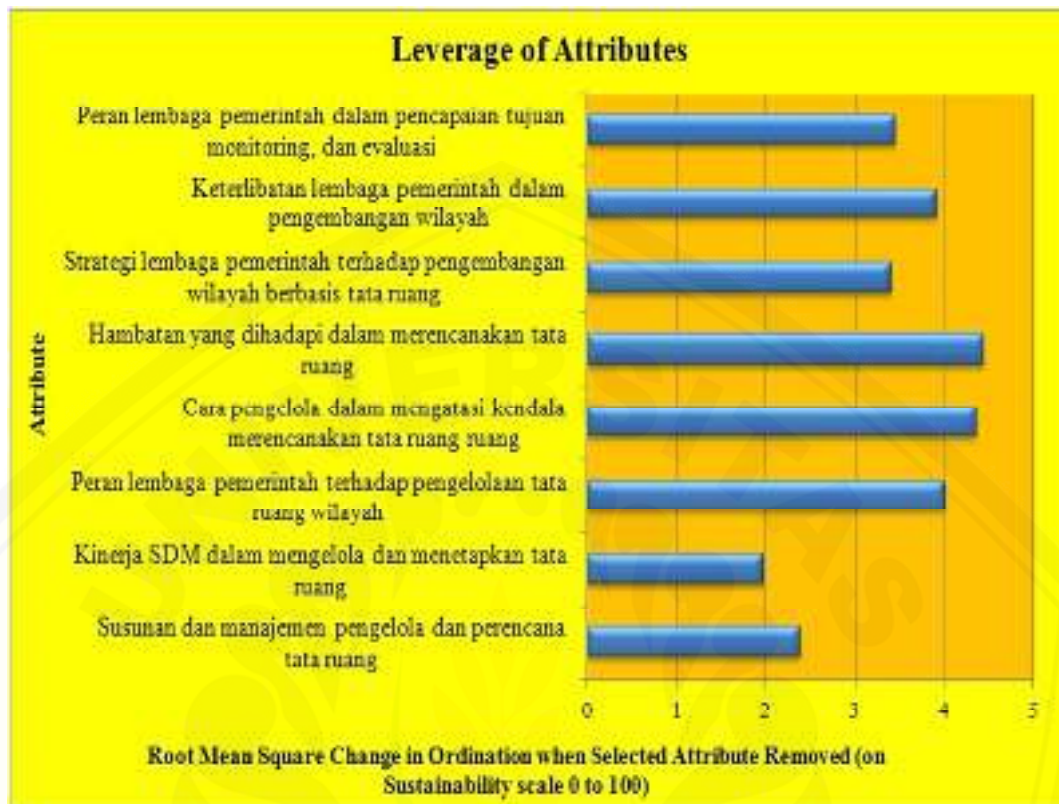


Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 75,80 (Sangat Keberlanjutan)

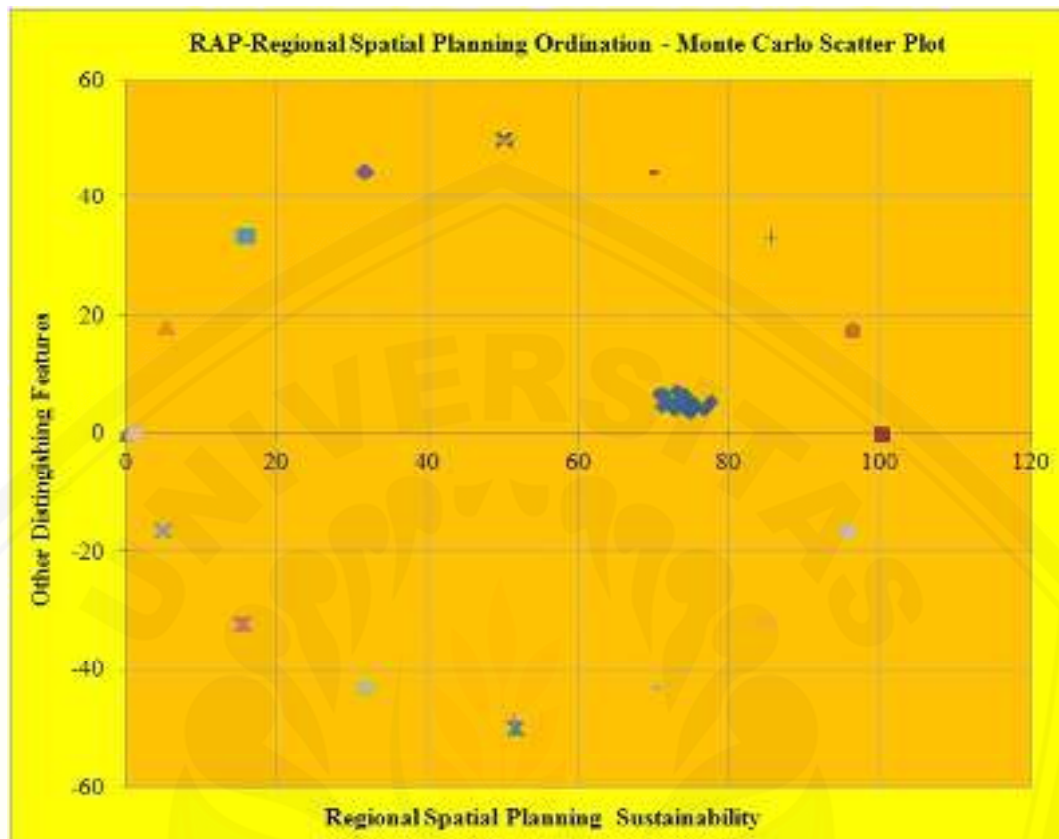
Nilai *Stress* = 0,13

Nilai R^2 = 0,95

F.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Kelembagaan

F.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Kelembagaan

No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Susunan dan manajemen pengelola dan perencana tata ruang	2,38	Sensitif
2	Kinerja SDM dalam mengelola dan menetapkan tata ruang	1,97	Tidak Sensitif
3	Peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan tata ruang wilayah	4,01	Sensitif
4	Cara pengelola dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang	4,36	Sensitif
5	Hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang	4,44	Sensitif
6	Strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis tata ruang	3,40	Sensitif
7	Keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan wilayah	3,91	Sensitif
8	Peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi	3,46	Sensitif

F.4 Hasil analisis *Monte Carlo* pada Dimensi Kelembagaan

Titik pusat evaluasi keberlanjutan pada dimensi kelembagaan berada antara nilai 70,54 – 77,27.

Lampiran G. Output Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

G.1 Hasil analisis *Rap- Regional Spatial Planning* pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

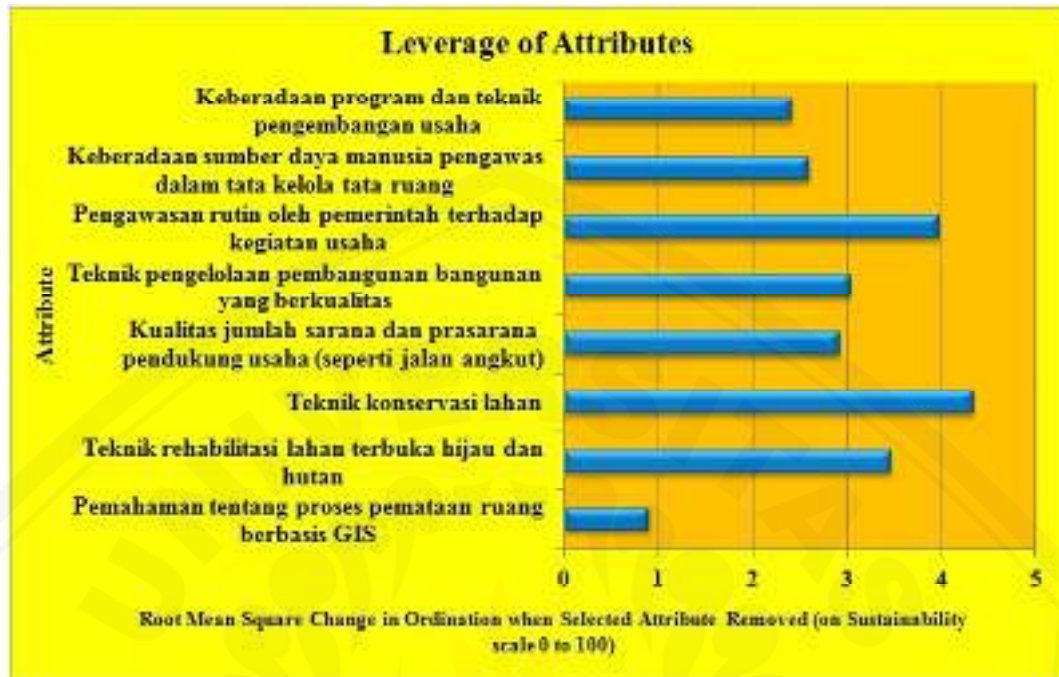


Keterangan :

Nilai *Rap- Regional Spatial Planning ordination* = 70,24 (Cukup Keberlanjutan)

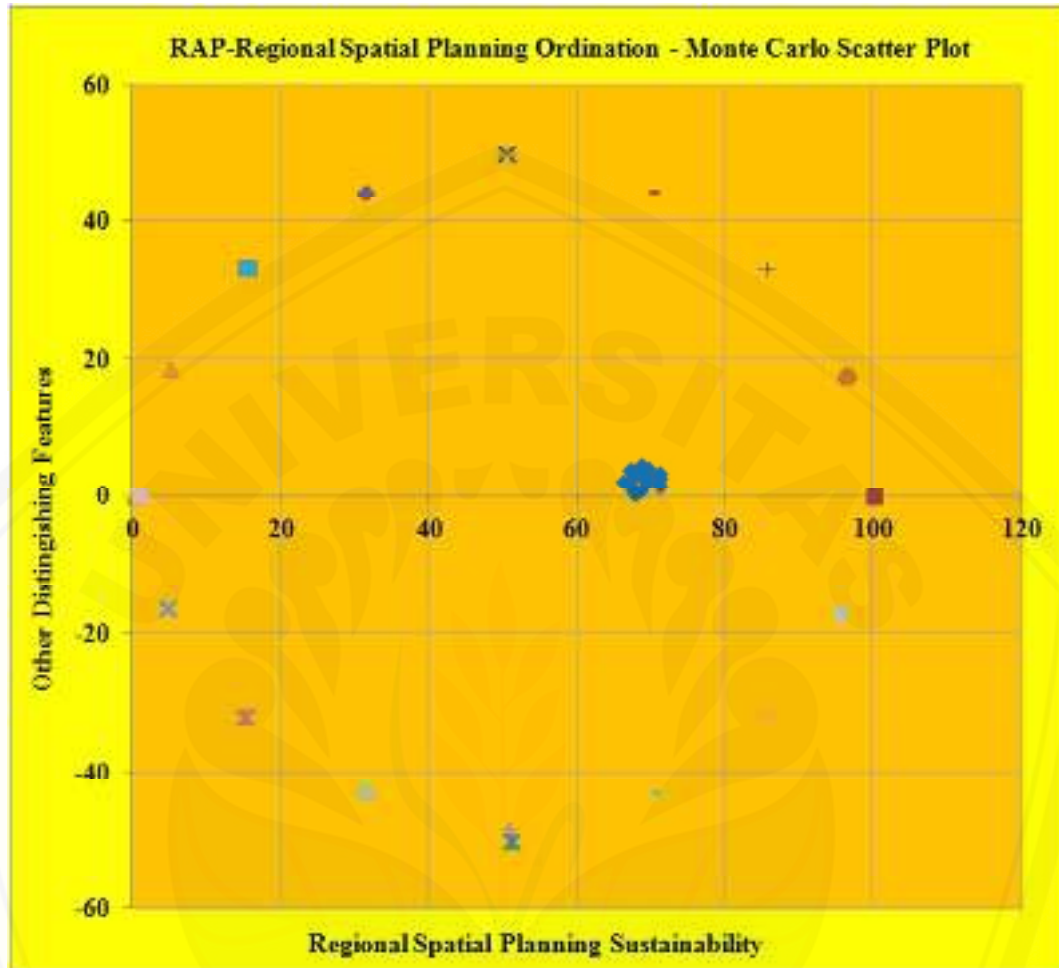
Nilai *Stress* = 0,14

Nilai R^2 = 0,94

G.2 Hasil analisis *leverage* pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

G.3 Nilai RMS masing masing atribut pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

No	Atribut	RMS %	Keterangan
1	Pemahaman tentang proses pemataan ruang berbasis GIS	0,89	Tidak Sensitif
2	Teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan	3,46	Sensitif
3	Teknik konservasi lahan	4,34	Sensitif
4	Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha (seperti jalan angkut)	2,91	Sensitif
5	Teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang berkualitas	3,03	Sensitif
6	Pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha	3,97	Sensitif
7	Keberadaan sumber daya manusia pengawas dalam tata kelola tata ruang	2,59	Sensitif
8	Keberadaan program dan teknik pengembangan usaha	2,41	Sensitif

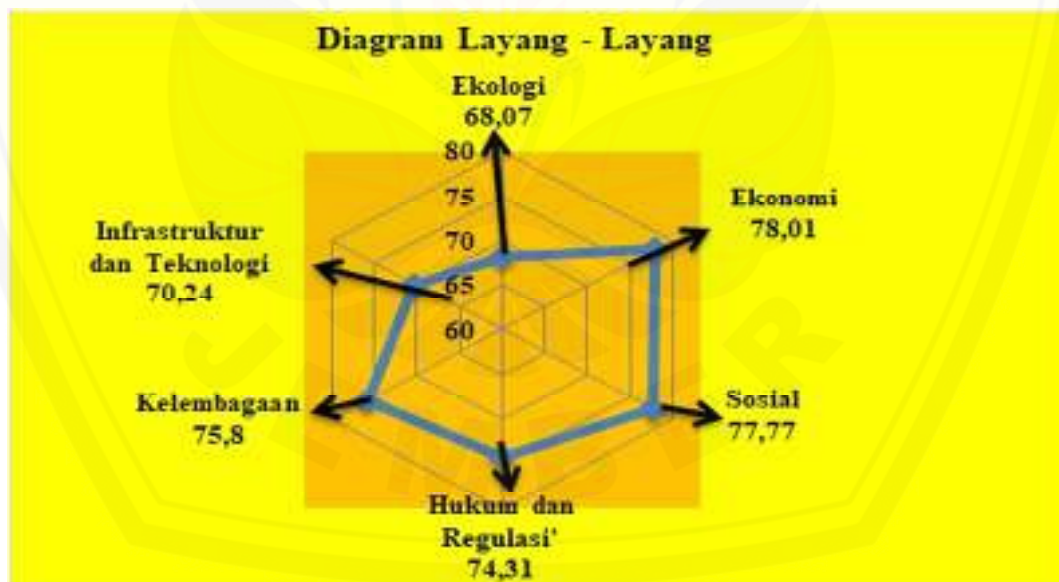
G.4 Hasil analisis *Monte Carlo* pada Dimensi Infrastruktur dan Teknologi

Titik pusat evaluasi keberlanjutan pada dimensi infrastruktur dan teknologi berada antara nilai 66,08 – 71,30.

Lampiran H. Hasil Analisis Status Keberlanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada masing masing dimensi

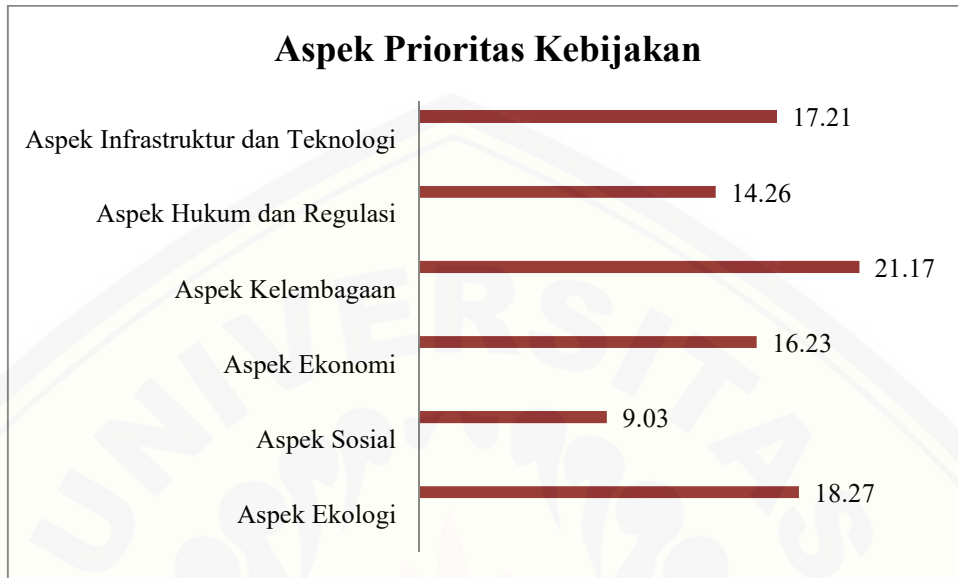
No	Dimensi	Jumlah Atribut	Hasil Analisis			Status Keberlanjutan
			<i>Rap-Regional Spatial Planning</i>	<i>Leverage Atributes (Atribut Sensitif)</i>	<i>Monte Carlo</i>	
1	Ekologi	11	68,07	3	64,17 – 70,59	Cukup Berkelanjutan
2	Ekonomi	10	78,01	8	71,51 – 78,45	Sangat Berkelanjutan
3	Sosial	9	77,77	9	71,45 – 78,24	Sangat Berkelanjutan
4	Hukum dan Regulasi	10	74,31	10	69,15 – 74,94	Cukup Berkelanjutan
5	Kelembagaan	8	75,80	7	70,54 – 77,27	Sangat Berkelanjutan
6	Infrastruktur dan Teknologi	8	70,24	7	66,08 – 71,30	Cukup Berkelanjutan

Lampiran I. Diagram Layang Layang per Dimensi



Lampiran J. Output Hasil *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Lampiran J.1 Aspek Prioritas Kebijakan



Lampiran J.2 Perhitungan Indeks Konsistensi (CI)

$$CI = \frac{6,407926 - 6}{6 - 1}$$

$$= 0,0815852$$

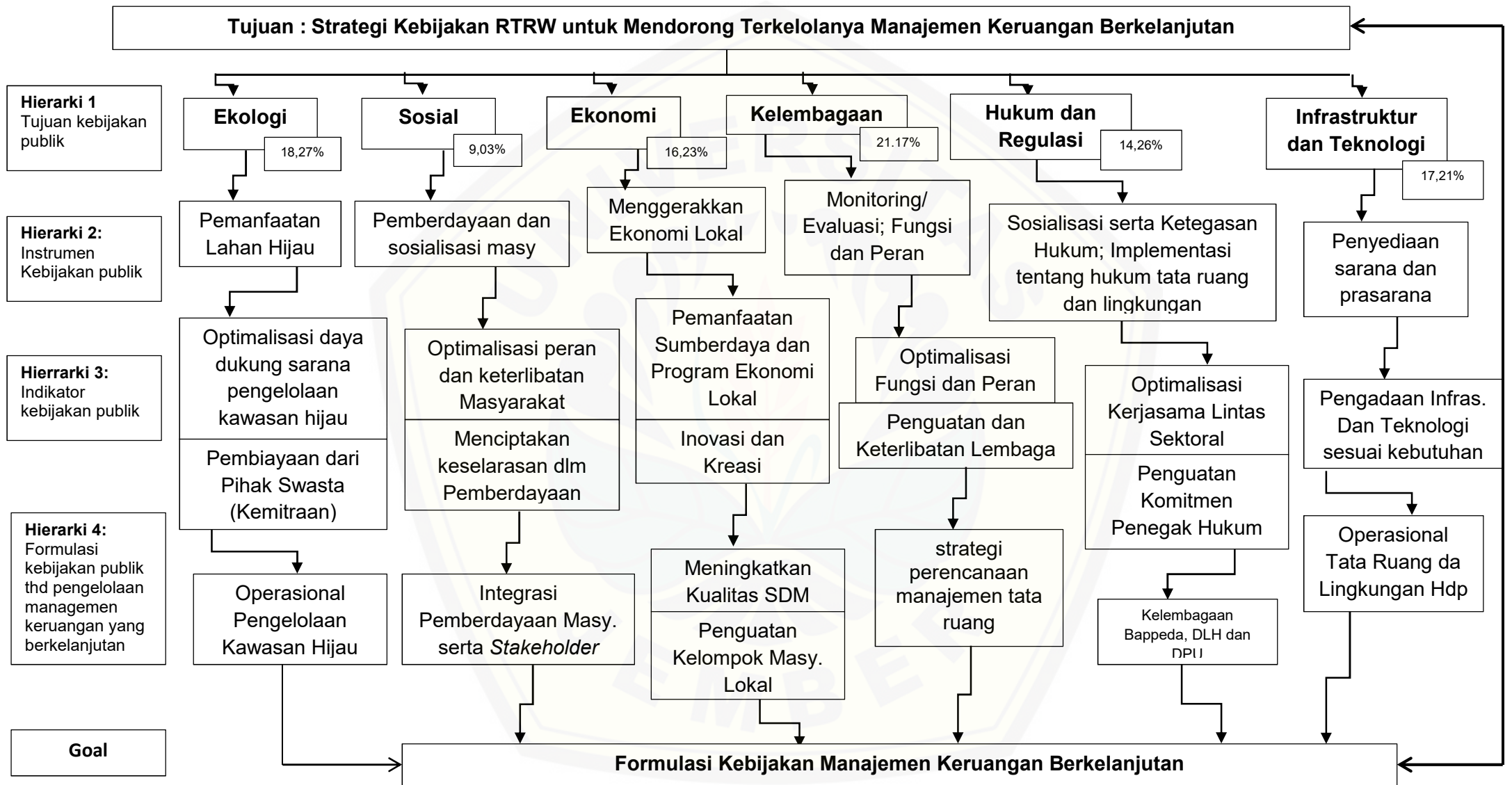
Lampiran J.3 Indeks Konsistensi Random (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Lampiran J.4 Perhitungan Rasio Konsistensi (CR)

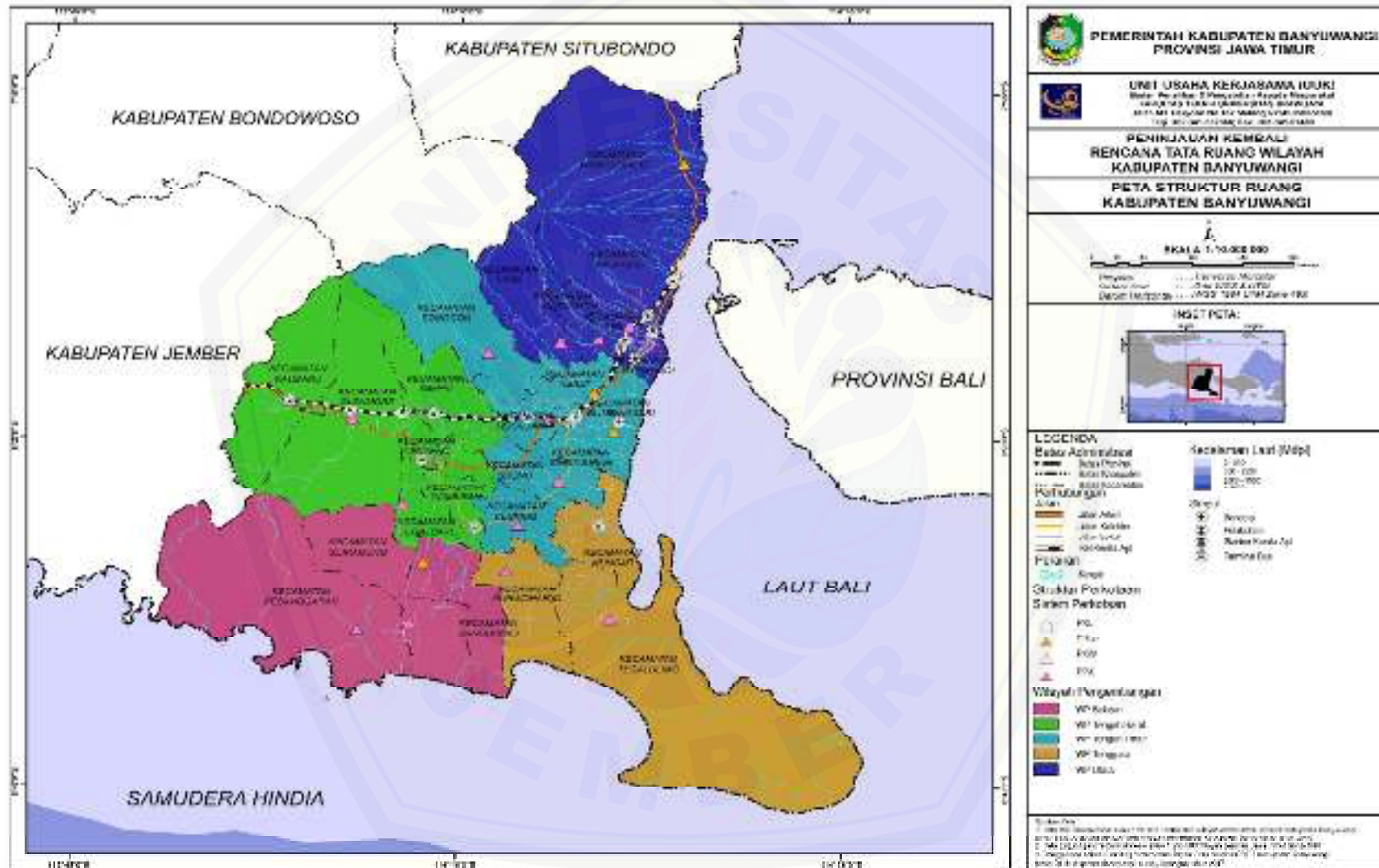
$$CR = \frac{0,0815852}{1,24}$$

$$= 0,06579452$$

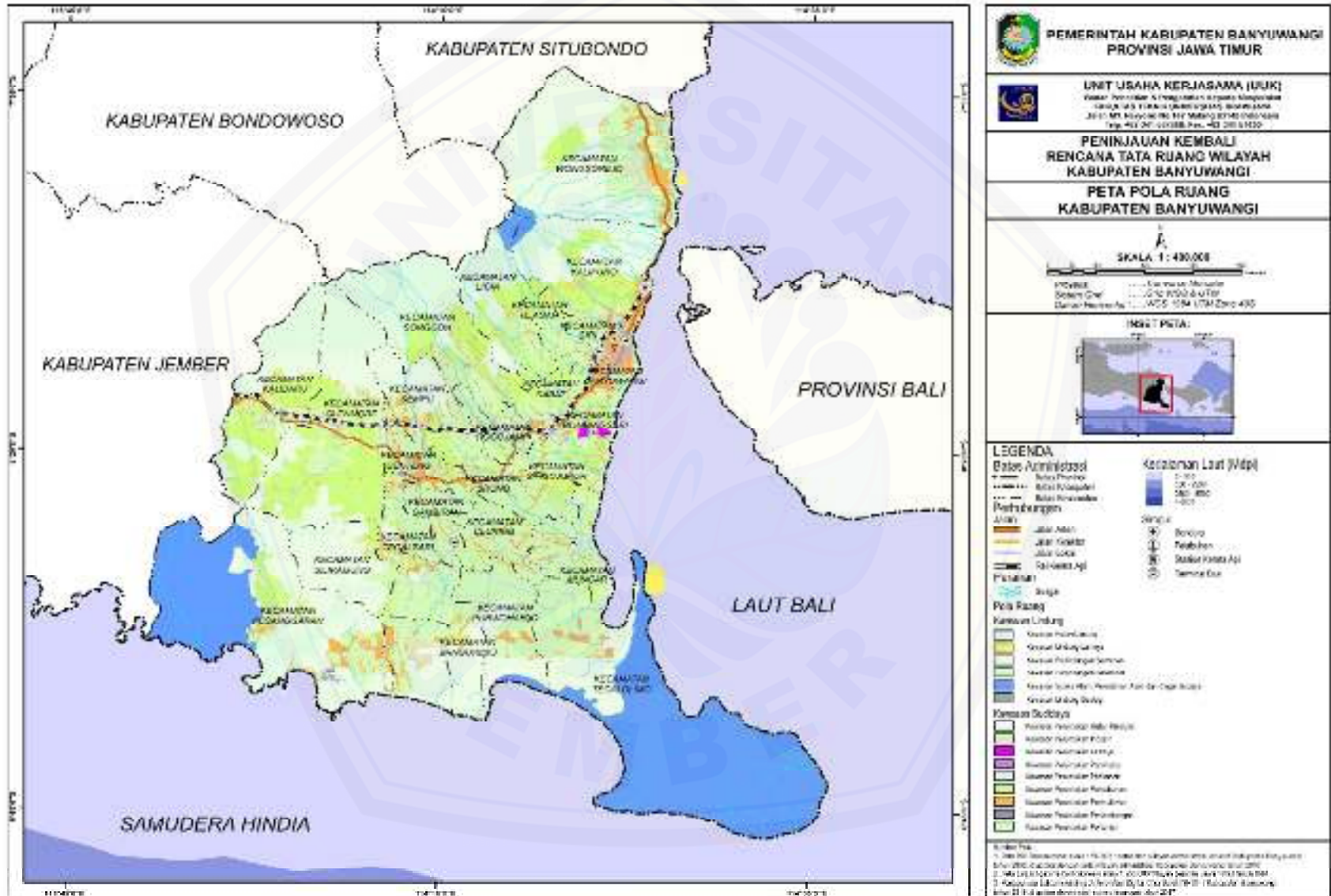


J.5 Hasil Struktur Hirarki Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

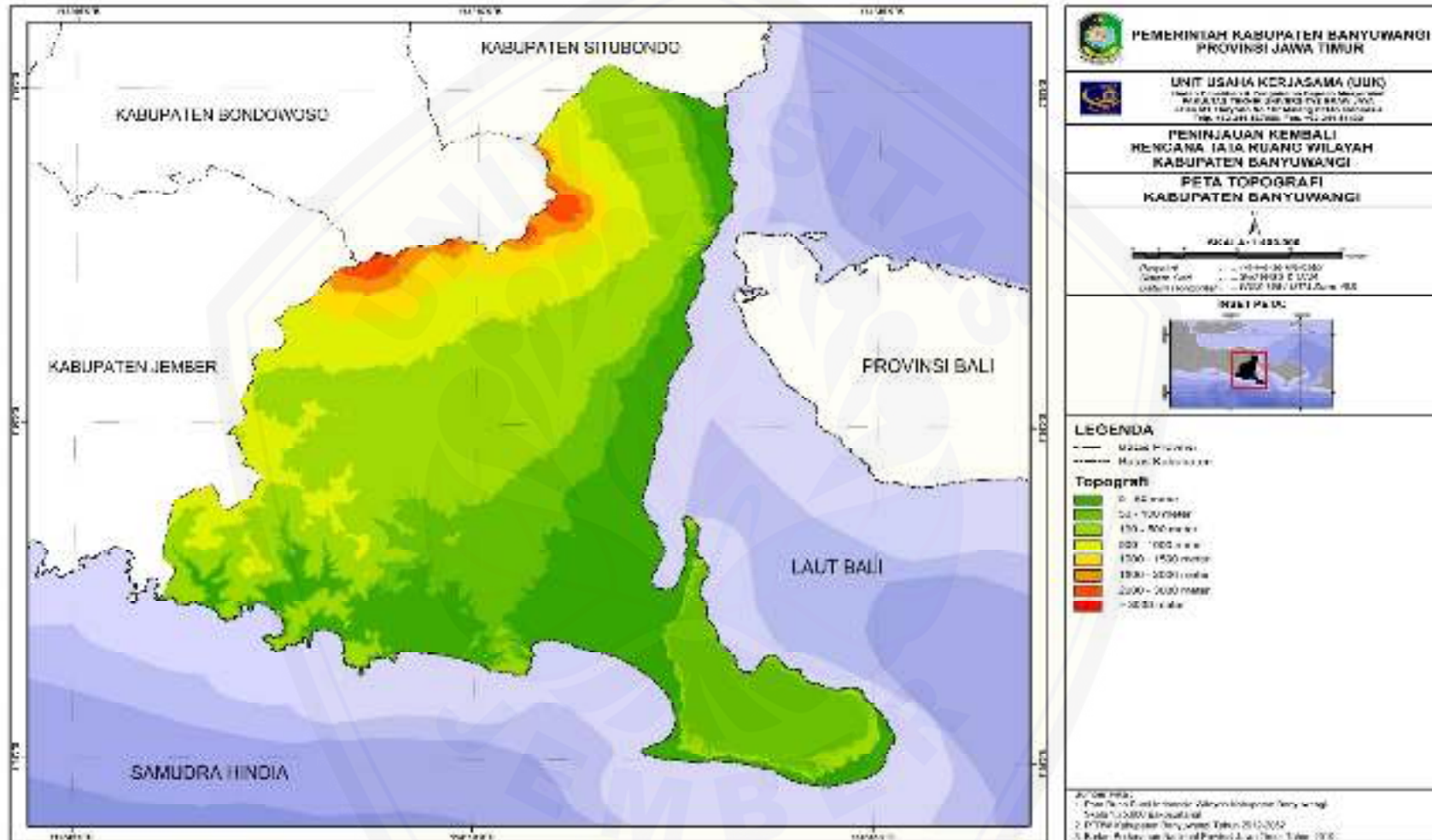
Lampiran K.1 Peta Pola Struktur Ruang Kabupaten Kabupaten Banyuwangi



Lampiran K.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi



Lampiran K.4 Peta Topografi Kabupaten Banyuwangi



UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

KUESIONER

**JUDUL : Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Banyuwangi
(Perspektif Pembangunan Berkelanjutan)**

Pelaksana Wawancara

Nama : Ilzam Nuzuli, S.E

NIM : 150820201012

**KUESIONER ANALISIS STATUS KEBERLANJUTAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

I. IDENTITAS RESPONDEN		No.....
1.	Nama	
2.	Pekerjaan Kawasan Permukiman Alamat RT/RW Desa/kelurahan Kecamatan Kab/Kota	: : : : :
3.	Umur	
4.	Jenis Kelamin	Laki –laki / Perempuan
5.	Tingkat pendidikan	1). SD 2). SMP 3). SMU 4). Diploma 5). Sarjana 6). Lainnya.....
6	Status lingkungan di permukiman	: Lestari (hijau) / Kering tandus / lain2:
7	Apakah kegiatan atau pengelolaan tata ruang wilayah menetapkan motif ekonomi	: ya, Mengapa : tidak, Mengapa
8	Apakah perusahaan pemegang usaha sdh menerakan etika dlm pengelolaan tata ruang wilayah	: ya, Mengapa : tidak, Mengapa
9	Apakah perusahaan pemegang usaha sdh menjaga kelestarian LH kawasan	: ya, Mengapa : tidak, Mengapa
10	Apakah yang telah dilakukan oleh perusahaan pemegang usaha sdh sesuai dgn tata kelola yg berkelanjutan	: ya, Mengapa : tidak, Mengapa

Petunjuk pengisian kuesioner untuk Analisis Status Keberlanjutan :

1. Terdapat 5 variabel (ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan regulasi, kelambagaan, infrastruktur dan teknologi). Masing-masing dimensi memiliki atribut dan kriteria masing-masing
2. Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk mengisikan Skor pada ujung kanan matrik pertanyaan, yaitu: 0, 1,2, atau 3
3. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil skor maka dampaknya semakin buruk/berat. Maka Skor 0 adalah dampak terburuk/berat, semakin tinggi nilainya (1,2 atau 3) maka dampaknya semakin baik (positif).
4. Agar diisi sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara

A. Variabel Ekologi		
Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Kondisi dan kualitas vegetasi hutan di wilayah	(0) Sangat berat semua tanah lapisan atas telah tererosi, tidak ada tumbuhan vegetasi (1) Berat, semua tanah lapisan atas telah tererosi, sedikit yang ditumbuhi vegetasi; (2) Sedang, sebagian besar tanah tererosi dan cukup banyak ditumbuhi vegetasi; (3) Ringan, sangat sedikit yang tererosi dan mayoritas ditumbuhi vegetasi
2	Luas sebaran lahan hijau	(0) Luas Lahan luas tp kering dan tidak subur; (1) Luas lahan hijau terbatas; (2) Luas lahan dgn kesuburan terbatas; (3) Luas lahan subur tersebar merata
3	Kondisi dan luas dataran tinggi	(0) Sangat berat (1) Berat (2) Sedang (3) Ringan
4	Ketersediaan dan Kualitas Air	(0) Tidak tersedia air; (1) Tersedia air dengan kualitas dan debit terbatas; (2) Terdapat air dnegan kualitas sedang; (3) Terdapat air dengann kualitas bagus
5	Tingkat gangguan kegiatan pembangunan terhadap ekosistem wilayah	(0) Sangat berat struktur lahan sangat terbatas/ rusak dan tidak bisa dipakai (1) Berat, yaitu struktur lahan terbatas/ rusak berat/hancur dan produktivitas tanahnya menurun; (2) Menengah, yaitu struktur lahan rusak berat/hancur, namun produktivitas tanahnya tidak menurun; (3) Ringan, yaitu struktur dasar suatu ekosistem tidak terganggu
6	Frekuensi kejadian kekeringan	(0) Sangat sering; (1) Sering; (2) Jarang; (3) Tidak pernah
7	Program konservasi dan penataan lahan hijau	(0) Tidak ada; (1) Ada tapi masih belum dilakukan (2) Ada tapi tidak berjalan dengan baik; (3) Ada dan berjalan dengan baik
8	Perbandingan luas	(0) Sangat tinggi

	kawasan untuk pemanfaatan industri dengan RTH	(1) Tinggi; (2) Cukup tinggi; (3) Hampir tidak ada	
9	Perubahan fungsi kawasan dengan adanya pembangunan	(0) Sangat besar (1) Cukup besar (2) Sedikit (3) Tidak ada perubahan	
10	Pelaksanaan rehabilitasi lahan	(0) Sangat sedikit; (1) Sedikit; (2) Cukup banyak; (3) Semua lahan di rehabilitasi	
11	Konsisten penerapan aturan zonasi wilayah dan pajak lingkungan terhadap penggunaan lahan kawasan kritis	(0) Sangat sedikit yang mematuhi; (1) Sedikit yang mematuhi; (2) Cukup banyak yang mematuhi; (3) Semua mematuhi	
B. Variabel Ekonomi			
Atribut		Indikator yang digunakan	Skor
1	Penciptaan peluang usaha baru	(0) Tidak ada; (1) Ada, sedikit; (2) Ada, banyak, (3) Sangat banyak	
2	Pengaruh terhadap pendapatan masyarakat	(0) Menurunkan pendapatan; (1) Tidak berpengaruh; (2) Berpengaruh tapi hanya meningkatkan sedikit; (3) Berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan masyarakat	
3	Pengaruh terhadap pendapatan perusahaan atau pihak swasta	(0) Menurunkan pendapatan; (1) Tidak berpengaruh; (2) Berpengaruh tapi hanya meningkatkan sedikit; (3) Berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan perusahaan	
4	Nilai ekonomi lahan yang menjadi penetapan suatu kawasan	(0) Sangat rendah; (1) Rendah; (2) Tinggi (3) Sangat tinggi	
5	Aktivitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri	(0) Hampir tidak ada aktifitas ekonomi; (1) Ada tapi sangat sedikit; (2) Ada tapi cukup banyak (3) Ada sangat banyak Aktifitas ekonomi pasca pengelolaan kawasan industri	
6	Kontribusi pembangunan kawasan terhadap PAD	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi	
7	Program pengembangan masyarakat untuk	(0) Tidak ada program untuk pendorong tata kelola; (1) Sebagian kecil perusahaan memiliki program tata kelola ;	

	mendorong tata kelola kawasan	(2) Sebagian besar perusahaan memiliki program tata kelola ; (3) Semua perusahaan memiliki program tata kelola	
8	Daya dukung dari keberadaan sarana pendukung pengelolaan kawasan hijau	(0) Tidak ada; (1) Minim, belum cukup; (2) Cukup memadai (3) Sudah memadai	
9	Biaya pemulihan kerusakan lingkungan	(0) Sedikit; (1) Sedang; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi	
10	Program ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan hijau	(0) Sangat sedikit, program amat tidak memadai; (1) Sedikit program yang memadai; (2) Cukup banyak program yang memadai; (3) Banyak program yang saesuai dan memadai	

C. Variabel Sosial

	Atribut	Indikator yang digunakan	Skor
1	Tingkat penyerapan tenaga kerja	(0) Tidak ada; (1) Ada, sedikit; (2) Ada, banyak (3) Sangat banyak	
2	hubungan masyarakat sekitar dengan pelaku industri	(0) Tidak serasi/harmonis; (1) Agak serasi/harmonis; (2) Cukup serasi (3) Serasi dan saling menguntungkan	
3	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial	(0) Tidak ada; (1) Ada tetapi tidak berjalan; (2) Kurang optimal; (3) Optimal	
4	Pengaruh pembangunan kawasan terhadap nilai sosial-budaya masyarakat,	(0) Pengaruh buruk; (1) Sedikit pengaruh buruk; (2) Tidak ada pengaruh; (3) Memberikan pengaruh baik	
5	Frekuensi konflik kesenjangan	(0) Sangat tinggi (1) Cukup tinggi (2) Rendsah (3) Tidak ada	
6	Pengaruh terhadap peningkatan pendidikan	(0) Tidak ada; (1) Sedikit; (2) Cukup tinggi; (3) Tinggi	
7	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sebagai proses pengembangan	(0) Rendah; (1) Sedang; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi	
8	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan	(0) Sangat buruk; (1) Buruk; (2) Cukup baik;	

		(3) Baik	
9	Tingkat keseriusan dan kepedulian untuk menghadapi masalah sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan	(0) Tidak serius dan tidak peduli dengan keluhan masyarakat; (1) Belum serius dalam menangani permasalahan sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan; (2) Cukup serius dalam menangani permasalahan sosial akibat keberadaan pengelolaan dan penetapan suatu kawasan; (3) Serius untuk memperhatikan keluhan dan masalah sosial yang timbul	
D. Variabel Hukum dan Regulasi			
Atribut		Indikator yang digunakan	Skor
1	Ketersediaan aturan perundangan untuk melestarikan Lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Sedikit ada aturan; (2) Cukup ada aturan (3) aturan sudah memadai	
2	Kepatuhan dalam memenuhi dan lingkungan hidup	(0) Semua tidak patuh; (1) Sebagian besar tidak patuh; (2) Sedikit yang tidak patuh; (3) Semua patuh	
3	Penyuluhan hukum dan implementasi tata ruang dan lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Ada dalam frekuensi yang kurang; (2) Ada dalam frekuensi yang cukup (3) Dalam frekuensi yang baik	
4	Penegakan hukum terhadap pelanggaran aspek lingkungan	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi	
5	Konflik antara pemegang usaha dengan masyarakat	(0) Banyak dan sering terjadi; (1) Cukup sering terjadi; (2) Jarang terjadi; (3) Tidak terjadi	
6	Konflik antara pemegang usaha dengan para pihak	(0) Banyak dan sering terjadi; (1) Jarang terjadi; (2) Jarang terjadi (3) Tidak Terjadi	
7	Kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan persh yang berawawasan lingkungan	(0) Tidak ada; (1) Ada tapi belum memadai; (2) Ada tapi belum terimplementasi dengan baik; (3) Ada dan sudah terimplementasi dengan baik	
8	Permasalahan ganti rugi lahan	(0) Sering terjadi; (1) Banyak terjadi (2) Jarang terjadi; (3) Tidak terjadi	
9	Kepastian hukum dalam menjalankan usaha	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi; (3) Sangat tinggi	
10	Penegakan hukum terhadap gangguan operasi perusahaan	(0) Rendah; (1) Cukup; (2) Tinggi;	

		(3) Sangat tinggi	
E. Variabel Kelembagaan			
Atribut		Indikator yang digunakan	Skor
1	Susunan dan manajemen pengelola dan perencana tata ruang	(0) Tidak ada (1) Ada tapi belum memadai (2) Ada cukup memadai (3) Ada sudah memadai	
2	Kinerja SDM dalam mengelola dan menetapkan tata ruang	(0) Sangat Buruk (1) Buruk (2) Cukup baik (3) Sangat Baik	
3	Peran lembaga pemerintah terhadap pengelolaan tata ruang wilayah	(0) Sangat Buruk (1) Buruk (2) Cukup baik (3) Sangat Baik	
4	Cara pengelola dalam mengatasi kendala merencanakan tata ruang ruang	(0) Tidak menguasai (1) Sedikit menguasai (2) Cukup menguasai (3) Sangat menguasai	
5	Hambatan yang dihadapi dalam merencanakan tata ruang	(0) Banyak (1) Cukup (2) Sedikit (3) Tidak ada	
6	Strategi lembaga pemerintah terhadap pengembangan wilayah berbasis tata ruang	(0) Tidak ada; (1) Ada tapi belum memadai; (2) Ada tapi belum terimplementasi dengan baik; (3) Ada dan sudah terimplementasi dengan baik	
7	Keterlibatan lembaga pemerintah dalam pengembangan wilayah	(0) Tidak ada (1) Sedikit (2) Cukup (3) Banyak	
8	Peran lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan monitoring, dan evaluasi	(0) Sangat buruk (1) Buruk (2) Cukup baik (3) Sangat baik	
F. Variabel Infrastruktur dan Teknologi			
Atribut		Indikator yang digunakan	Skor
1	Pemahaman tentang proses pemetaan ruang berbasis GIS	(0) Tidak memiliki pemahaman (1) Sebagian besar tidak memiliki pemahaman; (2) Cukup banyak yang memiliki pemahaman; (3) Rrata-rata sudah memahami	
2	Teknik rehabilitasi lahan terbuka hijau dan hutan	(0) Tidak dimiliki oleh semua persh; (1) Dimiliki oleh sebagian kecil persh; (2) Dimiliki oleh sebagian besar persh (3) Dimiliki oleh semua persh	
3	Teknik konservasi	(0) Tidak ada yang menguasai;	

	lahan	(1) Sedikit yang menguasai; (2) Cukup yang menguasai (3) Sebagian besar menguasai	
4	Kualitas jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha (seperti jalan angkut)	(0) Tidak dimiliki oleh semua persh ; (1) Tidak dimiliki oleh sebagian kecil persh; (2) Tidak dimiliki oleh sebagian besar persh; (3) Dimiliki oleh semua persh	
5	Teknik pengelolaan pembangunan bangunan yang berkualitas	(0) Tidak dipahami oleh semua persh; (1) Dipahami oleh sebagian kecil persh; (2) Dipahami oleh sebagian besar persh (3) Dimiliki oleh semua persh	
6	Pengawasan rutin oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha	(0) Hampir tidak pernah dilakukan; (1) Dilakukan namun dengan frequensi yang tidak memadai; (2) Dilakukan namun dengan frequensi yang belum memadai; (3) Rutin dilakukan dan sudah memadai	
7	Keberadaan sumber daya manusia pengawas dalam tata kelola tata ruang	(0) Sangat kurang; (1) Kurang; (2) Sudah cukup namun belum efektif; (3) Sudah cukup dan efektif dalam menjalankan pengawasa	
8	Keberadaan program dan teknik pengembangan usaha	(0) Sangat kurang; (1) Cukup kurang; (2) Sudah cukup namun belum efektif (3) Sudah cukup dan efektif dalam menjalankan pengawasan	

Apabila ada hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan hal-hal di atas, silahkan dituliskan di bawah ini:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KUISIONER AHP**Tujuan : Formulasi Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Mendorong Terkelolanya Manajemen Keruangan yang Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi**

Pengantar kuesioner penelitian.

Kuisisioner ini ditujukan untuk memilih prioritas dalam Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan terhadap model kebijakan yang direkomendasikan dengan menggunakan alat analisis AHP. Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan persepsi/penilaian ahli yang sifatnya subyektif, sehingga jawaban responden dibuat berdasarkan persepsi responden yang berkaitan dengan kebijakan publik terhadap Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Bahwa untuk memperoleh masukan/informasi seperti tersebut, maka yang akan dijadikan responden (yang dianggap ahli) adalah pihak yang ekspert pada bidang pengelolaan manajemen keruangan dan para pejabat terkait pada tata ruang wilayah serta pejabat dilingkungan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi serta para akademisi.

Mengingat pentingnya masukan/informasi dari Bapak/Ibu, maka kami mohon kiranya dapat membantu sepenuhnya dengan mengisi penilaian dengan sungguh-sungguh, agar hasil yang dicapai dapat memberikan formulasi terhadap Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu karena sifatnya penelitian adalah kajian ilmiah maka untuk menjamin keakuratan masukan yang Bapak/Ibu berikan, kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan mengisi data-data kuisisioner ini berupa identitas diri dan lembar pertanyaan di bawah ini:

Sebelum dan sesudahnya kami, sebagai peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang tiada terhingga dan semoga ALLOH.SWT yang akan membalas budi baik dari bapak/ibu dan saudara yang telah bersedia mengisi kuesioner ini.

Hormat Kami

Peneliti

Data Responden

Nama Lengkap (beserta gelar) :

PNS/Swsata/Aktifitis :

Jabatan/Pekerjaan :

Pangkat Golongan :

Unit Kerja :

Masa kerja :

Tempat tinggal : Kawasan Kota, Perdesaan, Pesisir

Alamat :

No Telp/HP :

Jenis Kelamin : Pria/Wanita*

Pendidikan Tertinggi : SMU/Akademi/S1/S2/S3*

Apakah memahami tg RTRW : . Ya../ Tidak

Pemahaman pada bidang : Regulasi RTRW :
 Operasional RTRW :
 Kelembagaan Tata Ruang :
 Partisipasi masyarakat :
 Lain-lain :

*coret yang tidak perlu

(Tanda Tangan)

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini merupakan peralatan pendukung Analytical Hierarchy Process (AHP). Adapun kuisisioner yang digunakan adalah sistem rangking yang menilai besarnya pengaruh anatar satu elemen faktor dengan elemen faktor lainnya. Dengan kata lain, setiap responden dapat memilih jawaban yang berada disisi kanan ataupun kiri menurut bobot kepentingannya. Bobot nilai yang dipakai dalam pertanyaan-pertanyaan ini diberi definisi verbal sebagai berikut:

- Nilai Bobot 1 = sama pentingnya
- Nilai Bobot 3 = sedikit lebih penting
- Nilai Bobot 5 = kuat pentingnya
- Nilai Bobot 7 = sangat kuat pentingnya
- Nilai Bobot 9 = mutlak lebih penting
- Nilai 2, 4, 6, 8 adalah nilai antara dari nilai bobot 1, 3, 5, 7, 9

Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan (antara 1 sampai dengan 9) dari kedua elemen faktor dengan membubuhkan tanda silang (X) pada salah satu kolom bobot nilai tersebut, seperti contoh berikut ini:

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Jawaban A lebih penting dari B dengan bobot 3
 Artinya: pilihan A “sedikit lebih penting” dibandingkan dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

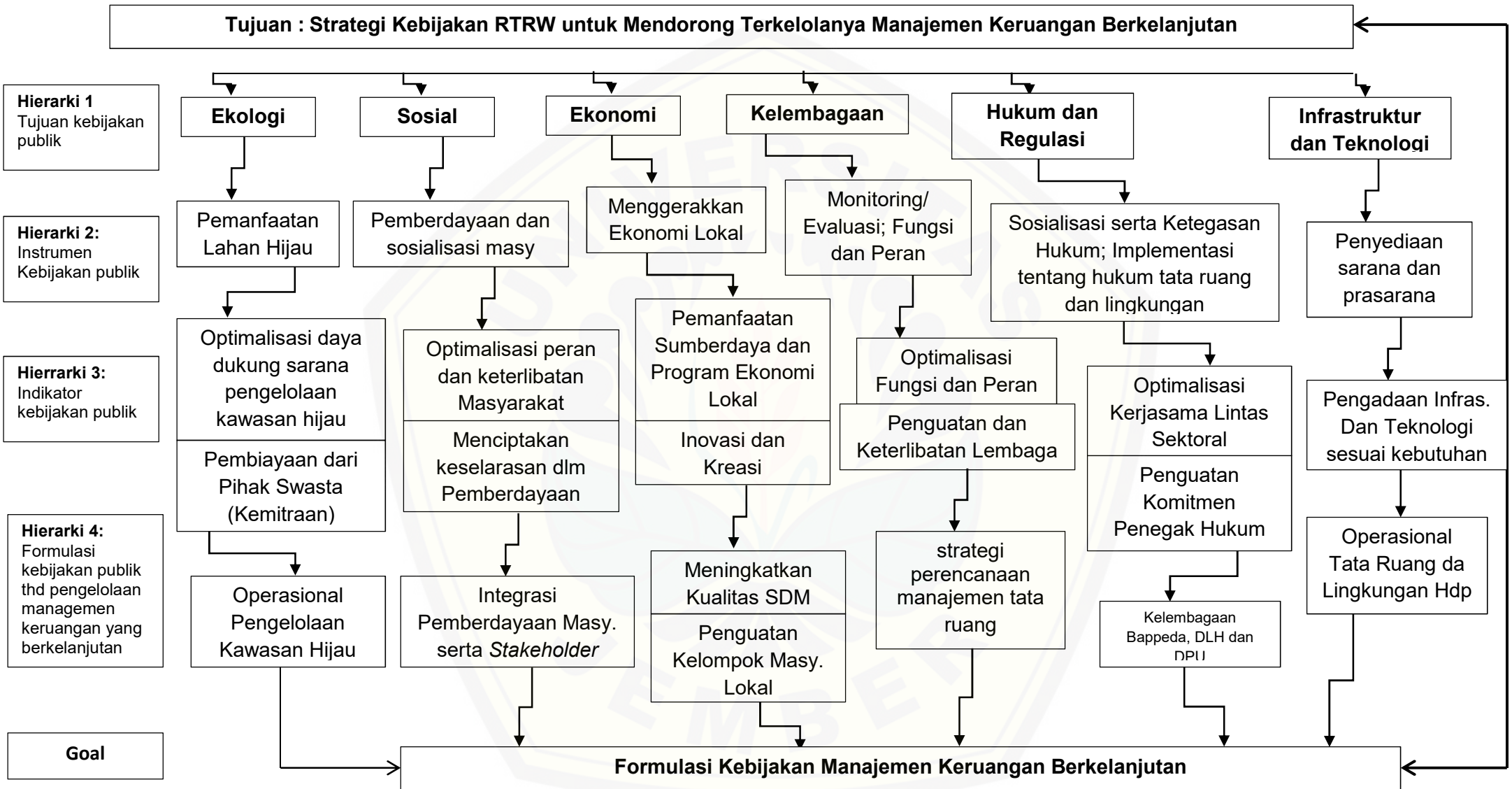
Jawaban B lebih penting dari A dengan bobot 7
 Artinya: Pilihan B “sangat kuat pentingnya” dibandingkan dengan pilihan A

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Jawaban A = B, bobot = 1
 Artinya: Pilihan A “sama penting” dengan pilihan B

Pada dasarnya tidak ada pedoman umum untuk membuat hirarki, tergantung dari pengalaman seseorang. Namun paling tidak hirarki harus cukup kompleks untuk menangkap suasana tetapi cukup sedikit agar sensitif terhadap perubahan-perubahan. (Mulyono, 1998:8). Hirarki yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis hirarki tak lengkap yang terlihat pada gambar dibawah.

Struktur hirarki dan formulasi kebijakan yang tepat dan benar terhadap Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:



Keterangan diagram :

Goal : Merupakan tujuan yang akan dicapai yaitu menyusun formulasi kebijakan Tata Ruang Wilayah untuk mendorong terkelolanya manajemen keruangan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level I : Tujuan Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level II : Instrumen dari Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level III : Indikator dari Kebijakan Publik terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Hirarki Level IV : Formulasi Kebijakan Publik dari Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Skala Prioritas dari Formulasi Kebijakan Publik yang mendukung terhadap pengembangan dan keberlanjutan terhadap Kelembagaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Kelembagaan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum
2. Operasional Pengelolaan Kawasan Hijau
3. Pemberdayaan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lokal
4. Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keruangan
5. Operasional Tata Ruang dan Kawasan Hijau

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berkaitan terhadap pengembangan dan keberlanjutan kelembagaan Tata Ruang Wilayah serta Operasional Kawasan Lahan Hijau sebagai instrumen strategis mewujudkan kemandirian ekonomi Masyarakat Lokal di Kabupaten Banyuwangi maka penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu pentingnya sebuah dasar pencapaian tujuan maka dasar dari penetapan tujuan yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan?

Ekologi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur dan Teknologi
Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi
Kelembagaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hukum dan Regulasi

2. Perspektif terhadap penetapan tujuan yang berbasiskan pada **Ekologi, Sosial, Ekonomi, Kelembagaan Hukum dan Regulasi, serta Infrastruktur dan Kelembagaan** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa instrumen pada penetapan tujuan. Instrumen kebijakan publik yang dimaksud agar dapat diterapkan dengan baik. maka, instrumen kebijakan mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Ekologi																		Infrastruktur dan Teknologi
Pemanfaatan Lahan Hijau	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Menyediaan Sarana dan Prasarana
Sosial																		Ekonomi
Pemberdayaan dan sosialisasi masy	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Menggerakkan Ekonomi Lokal
Kelembagaan																		Hukum dan Regulasi
Monitoring/ Evaluasi; Fungsi dan Peran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sosialisasi serta Ketegasan Hukum; Implementasi tentang hukum tata ruang dan lingkungan

3. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Ekologi** yang berbasiskan pada **Pemanfaatan Lahan Hijau** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Optimalisasi daya dukung sarana pengelolaan kawasan hijau	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembiayaan dari Pihak Swasta (Kemitraan)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

4. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Sosial** yang berbasiskan pada **Pemberdayaan dan Sosialisasi Masy.** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Optimalisasi peran dan keterlibatan Masyarakat	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Menciptakan Keselarasan dalam Pemberdayaan Masy.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

5. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Ekonomi** yang berbasiskan pada Menggerakkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Pemanfaatan Sumberdaya dan Program Ekonomi Lokal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Inovasi dan Kreasi
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

6. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Kelembagaan** yang berbasiskan pada **Monitoring/ Evaluasi; Fungsi dan Peran** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Optimalisasi Fungsi dan Peran	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan dan Keterlibatan Lembaga
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

7. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Regulasi dan Hukum** yang berbasiskan pada **Sosialisasi serta Ketegasan Hukum; Implementasi tentang hukum tata ruang dan lingkungan** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Optimalisasi Kerjasama Lintas Sektoral	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan Komitmen Penegak Hukum
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

8. Bila Instrumen terhadap penetapan tujuan **Infrastruktur dan Teknologi** yang berbasiskan pada **Menyediaan Sarana dan Prasarana** di Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa indikator pada penetapan tujuan maka **indikator penetapan tujuan** mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Pengadaan Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengadaan Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Terkait dengan penyusunan **format sebuah kebijakan publik**, maka formulasi kebijakan publik terhadap Strategi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen mewujudkan terkelolanya manajemen keruangan di Kabupaten Banyuwangi, yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan ?

Ekologi																			Infrastruktur dan Teknologi
Operasional Pengelolaan Kawasan Hijau	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Operasional Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
Sosial																			Ekonomi
Integrasi Pemberdayaan Masy. serta Stakeholder	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningkatkan Kualitas SDM	
Kelembagaan																			Hukum dan Regulasi
Lembaga Bappeda, DLH dan DPU	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang	